



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

## **KEIKUTSERTAAN PEMUDA PELAJAR DAN MAHASISWA DALAM PRRI (1956-1961)**

### **SKRIPSI**



**AINIL HUDA  
04181018**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2011**

## KATA PENGANTAR

Syukur *Alhamdulillah*, berkat rahmat Allah SWT. Tulisan ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas semua bantuan moril, sumbangan pemikiran dan bahan berharga dari berbagai pihak.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Pembimbing I, Prof. Dr. Phil. Gusti Asnan dan Pembimbing II, Prof. Dr. Herwandi, M.Hum., atas segenap ketulusan yang beliau berikan semasa mendidik penulis dalam aktivitas perkuliahan maupun dalam memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada Ketua Jurusan Sejarah Drs. Sabar, M.Hum., beserta Sekretaris Jurusan Sejarah Dra. Enimay, M.Si. Selanjutnya kepada segenap staf pengajar Jurusan Sejarah, Dr. Muhammad Nur, M.S., Dr. Anatona, M.Hum., Dr. Lindayanti, M.Hum., Drs. Zulqayyim, M.Hum., Drs. Syafrizal, M.Hum., Drs. Zaiyyardam, M.Hum., Drs. Nopriyasman, M.Hum., Drs. M. Djuir, Dra. Irianna, Dra. Midawati, M.Hum., Drs. Wanofri Samry, M.Hum., Drs. PurwoHusudo, M.Hum., Drs. Armansyah, Alm. Drs. M. Fachturrahman, Witrianto, S.S., M.Si., M.Hum., Israr Iskandar, SS., M.Si., Dra. Yenni Narni, Hari Effendi, SS. M.Hum., dan Yudi Andoni, S.S., atas semua bekal ilmu yang diberikan kepada penulis.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak. Terima kasih kepada bapak Syamdani, S.Pd atas buku dan dokumennya. Selanjutnya kepada para informan yang rela berbagi waktu untuk kepentingan penulis melalui kegiatan wawancara, bapak Prof. DR.dr. Asnil Sahim, Bapak Syarifuddin Syarif dan informan yang lainnya. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada petugas perpustakaan yang penulis kunjungi selama penelitian.

Terima kasih yang sangat besar dan tulus penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis, Ibunda Mardiah dan Ayahanda Nurman atas keikhlasan dan curahan kasih sayang yang diberikan kepada penulis, serta do'a dan kesabaran beliau berdua dalam membesarkan dan menghadapi tingkah laku penulis. Untuk kedua kakak penulis Atika dan Ashabal Kahfi terima kasih juga atas do'a-do'a nya terhadap penulis, keponakan kecilku Badiuz zaman semoga menjadi anak yang jenius. Terima kasih juga penulis sampaikan untuk Mak Wo Sarina, sepupuku Adil, Neza, Niyen dan Suami atas dorongan semangatnya kepada penulis juga buat kakak Kirani dan Dede' Maje yang lucu dan imut.

Selanjutnya kepada teman-teman penulis di Jurusan Sejarah, khususnya Hist. Angkatan 2004; Ilas (met menempuh hidup baru), Wily, Pia Dj, Rani, Putri teman-teman sama berjuang (hidup adalah perjuangan teman), Ipan (terima kasih telah menemani penulis wawancara), dan teman-teman lainnya terima kasih atas dorongan semangatnya. Buat teman-teman kost penulis, si kembar Ni Sil dan Ni Dya (*Thanks for every thing*), Sisca Dresari, Ni Erna, Ni Riza, Ni Rezi, Mba Des, Ni Prita, Ni Leni dan Dela, terima kasih atas do'anya.

Tentunya masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan masukan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi yang membacanya. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Padang, September 2011

Penulis



## ABSTRAK

Berbicara mengenai PRRI banyak aspek yang bisa dikaji dalam peristiwa yang terjadi antara tahun 1958-1961, diantaranya keterlibatan pemuda pelajar dan mahasiswa dalam PRRI. Pemuda pelajar dan mahasiswa turut ambil bagian dalam peristiwa PRRI, mereka menjadi pasukan lapis dua PRRI. Mereka memiliki berbagai tugas yang dipercayakan oleh pimpinan PRRI kepada mereka, seperti menjadi pasukan pengawal pimpinan PRRI, menjadi sekretaris pribadi dan menjadi komandan-komandan pleton dalam pasukan PRRI. Tugas-tugas yang diemban oleh pemuda pelajar dan mahasiswa ini menarik untuk dikaji, maka skripsi ini diberi judul "Keikutsertaan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Dalam PRRI (1956-1961)", dan penelitian dilakukan tanpa mengabaikan tahapan penelitian sejarah yakni heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

Pemuda pelajar dan mahasiswa merupakan golongan yang sangat kritis dan adaptif serta bisa melihat dan menilai sesuatu hal yang sedang berlangsung ditengah masyarakat. Mereka merupakan aktor perubahan dan memiliki kontribusi untuk melakukan perubahan tersebut, mereka ingin melihat terjadinya perkembangan di tengah masyarakat baik dari segi pembangunan, ekonomi, pendidikan dan aspek-aspek lain yang bisa membuat perubahan ke arah yang lebih baik bagi kehidupan masyarakat.

Ketika ada wadah untuk melakukan perbaikan kehidupan tersebut yakni Dewan Banteng, maka golongan terpelajar ini memberikan dukungan mereka terhadap Dewan Banteng. Bahkan ketika Dewan Banteng berubah menjadi PRRI, pemuda pelajar dan mahasiswa masih setia memberikan dukungannya dan bersedia mengangkat senjata untuk membela PRRI dan kampung halaman mereka dari serangan tentara pusat. Pemuda pelajar dan mahasiswa diposisikan sebagai pasukan lapis kedua PRRI dan juga memiliki tugas-tugas yang cukup penting seperti menjadi ajudan dan pengawal pimpinan PRRI, sebagai mata-mata, dan staf-staf dalam urusan-urusan sipil PRRI. Disaat perang berlangsung dengan APRI, PRRI memilih bergerilya di hutan-hutan Sumatera Tengah dan dalam perjalanannya juga melakukan konsolidasi pasukan dengan mengadakan pendidikan capa di Tabek Panjang bagi pemuda pelajar dan mahasiswa.

Selama berlangsungnya PRRI, pemuda pelajar dan mahasiswa adalah kelompok yang loyal terhadap keberadaan PRRI. Bisa dikatakan keberlangsungan PRRI selama hampir 3,5 tahun karena keberadaan pemuda pelajar dan mahasiswa dalam menjaga konsistensi PRRI, mereka memiliki semangat tempur yang tinggi dibandingkan dengan pasukan regular PRRI. Keputusan Ahmad Husein untuk mengakhiri perang dengan pemerintah pusat adalah dikarenakan memikirkan masa depan generasi muda yang tergabung dalam PRRI. Setelah perang berakhir mereka diizinkan untuk kembali melanjutkan pendidikannya, namun tidak sedikit yang mengalami masa suram setelah kembali ke sekolah dan kuliah mereka bahkan mereka belum bisa menerima kenyataan pahit kalau PRRI telah berakhir dengan kekalahan.



## DAFTAR ISI

*Halaman*

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan penelitian .....	9
D. Kerangka Analisis .....	10
E. Metode Penelitian dan Bahan Sumber .....	13
F. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II PEMUDA PELAJAR dan MAHASISWA MASA DEWAN BANTENG .....</b>	<b>16</b>
A. Terbentuknya Dewan Banteng .....	16
B. Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Mendukung Dewan Banteng .....	27
<b>BAB III PEMUDA PELAJAR dan MAHASISWA BERGABUNG dengan PRRI .....</b>	<b>36</b>

A. Alasan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Bergabung Dengan PRRI....	36
B. Proses Perekrutan dan Pelatihan Militer Bagi Pelajar dan Mahasiswa .....	44
<b>BAB IV PEMUDA PELAJAR dan MAHASISWA dalam PRRI .....</b>	<b>49</b>
A. Menjadi Pasukan Lapis Dua PRRI .....	49
B. Akhir dari Perang Saudara .....	67
C. Profil Pemuda Pelajar dan Mahasiswa .....	75
1. Asnil Sahim .....	75
2. Syarifuddin Syarif .....	78
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>82</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>DAFTAR INFORMAN .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>91</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Munculnya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) adalah sebagai akumulasi dari kekecewaan rakyat di daerah terhadap pemerintah pusat di Jakarta. Kekecewaan yang diakibatkan oleh sentralisasi kekuasaan dan memunculkan kesenjangan pembangunan di segala bidang antara pusat dan daerah, pembangunan di daerah terutama di Sumatera Tengah tidak berjalan dengan baik setelah hampir sepuluh tahun Indonesia merdeka. Sebagai contoh M. Yamin menyebutkan salah satu keadaan di mana jalan raya di Sumatera Tengah banyak yang berlobang dan rusak berat, sedangkan di pulau Jawa jalan raya sudah baik keadaannya. Akibat yang ditimbulkan oleh prasarana jalan raya yang tidak baik adalah membuat perekonomian masyarakat tidak berkembang dengan baik.<sup>1</sup>

Diproklamirkannya PRRI oleh Ahmad Husein di Padang pada tanggal 15 Februari 1958 mendapat sambutan dan dukungan penuh dari Perjuangan Semesta (PERMESTA) di Sulawesi.<sup>2</sup> Sejumlah tokoh nasional baik sipil maupun militer juga memberikan dukungan dan ikut bergabung dengan PRRI di Sumatera Barat, antara lain M. Natsir, Syafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, M. Syafe'i, Kolonel

---

<sup>1</sup> M. Yamin, *Dewan Banteng Contra Neo Ningrat*. (Jakarta: LPPM Tan Malaka, 2009) hal. 18

<sup>2</sup> Mestika Zed dan Hasril Chaniago, *Perlawanan Seorang Pejuang Biografi Kolonel Ahmad Husein*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001) hal. 274

sekolah tinggi yang jumlahnya cukup banyak dan memberikan peluang yang besar kepada generasi muda Sumatera Tengah untuk menikmati pendidikan.<sup>5</sup>

Ketika terjadinya aksi gerakan daerah yang dipelopori oleh Dewan Banteng, para pemuda pelajar dan mahasiswa berdiri di belakang Dewan Banteng. Bahkan para pemuda pelajar dan mahasiswa ikut memberikan dukungan kepada Dewan Banteng dalam pengambilalihan kekuasaan dari Gubernur Sumatera Tengah Roeslan Moelyohardjo saat itu. Dewan Banteng juga memfasilitasi penyelenggaraan kongres pelajar demobilisasi atau tentara pelajar komando Sumatera Tengah di Padang pada tanggal 11 sampai 13 Desember 1956 yang memutuskan mendukung segala tindakan hasil keputusan reuni ex-Divisi Banteng.<sup>6</sup>

Dukungan yang diberikan oleh pemuda pelajar dan mahasiswa terlihat jelas dalam apel besar yang dilangsungkan di kota Padang pada tanggal 20 Februari 1958 untuk mendukung Ahmad Husein. Para pemuda pelajar dan mahasiswa ini memiliki sikap tegas dalam mendukung Dewan Banteng dan PRRI, mereka mengorganisasikan diri dalam Badan Kontak Aksi Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa Sumatera Tengah (BKAPPM-ST). Mereka secara beranting menggalang massa untuk mendukung PRRI

---

<sup>5</sup> Sekolah-sekolah yang bermunculan seperti Sekolah Teknik, Sekolah Keperawatan, Sekolah Guru, Sekolah Menengah Ekonomi Atas, dan sekolah-sekolah tinggi diantaranya Perguruan Tinggi Ilmu Hukum di Bukittinggi, Perguruan Islam Tinggi di Bukittinggi, Fakultas Filsafat dan Hukum di Padang Panjang, Fakultas Pertanian di Payakumbuh, Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) di Batusangkar, Fakultas Kedokteran di Bukittinggi. Tanggal 13 September 1956 PTPG, Fakultas Kedokteran, Fakultas Pertanian dan Perguruan Tinggi Hukum dan Pemerintahan digabung menjadi satu universitas yakni Universitas Andalas. Perkumpulan pemuda pelajar dan mahasiswa yang ada diantaranya Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia Sumatera Tengah (IPPI-ST), Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pemuda Rakyat, dan Front Pemuda Indonesia. Gusti Asnan, *Memikir Ulang Regionalisme Sumatera Barat Tahun 1950-an*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007) hal 38-40

<sup>6</sup> *Ibid*, lihat juga Soewardi Idris, *Perjalanan Dalam Kelam Senarai Kisah Pemberontakan PRRI*. (Yogyakarta: Beranda, 2008) hal 189



dan mereka menyatakan kesiapannya untuk dipersenjatai oleh Dewan Banteng untuk ikut berperan aktif dalam memperjuangkan apa yang mereka yakini.<sup>7</sup>

Sejumlah mahasiswa dari kader-kader Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menyatakan mendukung PRRI walaupun secara organisatoris tidak ada kebijakan tentang dukungan tersebut. Dukungan yang diberikan oleh pemuda pelajar dan mahasiswa ini adalah dalam bentuk moral dan fisik dengan turun ke medan pertempuran.<sup>8</sup> Bergabungnya pemuda pelajar dan mahasiswa dalam PRRI dilatarbelakangi oleh dunia mahasiswa dan pelajar yang sering diidentikkan dengan dunia keilmuan dan menolak setiap perilaku yang irasional, menolak tindakan-tindakan yang mendustai prinsip-prinsip kebenaran. Hal itulah yang menyebabkan pemuda pelajar dan mahasiswa sangat peka merasakan perkembangan politik secara nasional.<sup>9</sup> Selain itu, keterlibatan kalangan muda dalam PRRI karena kecintaannya kepada kampung halaman, tanah kelahiran dan kehidupan keluarga mereka.<sup>10</sup>

Pemuda pelajar dan mahasiswa memiliki peranan yang besar dengan keikutsertaan mereka dalam PRRI. Mereka direkrut dan dilatih secara militer oleh pasukan reguler PRRI untuk menjadi pasukan sukarela atau pasukan lapis dua PRRI. Mereka diberikan latihan selama beberapa minggu kemudian digabungkan ke dalam

---

<sup>7</sup> Mestika Zed dan Hasril Chaniago, *Perlawanan Seorang Pejuang Biografi Kolonel Ahmad Husein*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), hal 278.

<sup>8</sup> Popi Adiyas Putra, "Gerakan Kaum Muda di Bawah Tekanan Orde Baru: Studi Tentang Pelajar Islam Indonesia di Sumatera Barat 1987-1998". *Skripsi*. (Padang: Fakultas Sastra Universitas Andalas, 2005)

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 38

<sup>10</sup> Syuib Ms, *Pelajar, Mahasiswa dan Pemuda Pada Masa dan Paska PRRI, Makalah*. (Padang: STKIP, 14 Maret 2009).

satuan militer PRRI, bahkan ada tentara sukarela PRRI yang tidak mendapatkan pelatihan militer sama sekali. Pasukan sukarela dari pemuda pelajar dan mahasiswa digabungkan dalam kompi-kompi kecil di setiap daerah seperti Kompi Mawar, Kompi Melati, Kompi Sadelberg, Bataliyon Harimau Minang, Bataliyon Beruang Agam, Bataliyon Kuranji dan Bataliyon Kapujan.<sup>11</sup>

Tugas yang dijalankan oleh tentara pelajar dan mahasiswa ini bermacam-macam bentuknya, seperti pemuda dan mahasiswa yang ada di sektor Padang Utara umpamanya bertugas menjaga daerah sekitar pantai sepanjang Teluk Bayur sampai ke Purus. Jajaran militer PRRI mengandalkan tentara lapis kedua PRRI ini sebagai pengawal, pengintai musuh dan melakukan pencegahan terhadap musuh,<sup>12</sup> mahasiswa kedokteran Unand bahkan ada yang menjadi tim medis. Di Solok, para pelajar yang menjadi pasukan sukarelawan PRRI diberi tugas berdasarkan fisik dan keahlian yang dimiliki. Jika seorang pelajar memiliki bentuk fisik yang bagus, maka akan diberikan tugas mengangkat senjata dan bergabung dalam pasukan, namun pelajar yang fisiknya biasa-biasa saja akan diberi tugas sebagai mata-mata dan sebagai pembantu dalam tugas-tugas administrasi dan juga sebagai kurir.<sup>13</sup>

Pemuda pelajar dan mahasiswa ikut bergerilya di hutan-hutan setelah pasukan PRRI dipukul mundur oleh Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI). Mereka juga diandalkan sebagai pengawal atau ajudan pribadi dari pimpinan-pimpinan PRRI seperti Ahmad Husein, Syafruddin Prawiranegara, M. Natsir, di wilayah Agam atau

---

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Mestika zed, *Op Cit.* hal 326

<sup>13</sup> Ahmad Kusasi, "Aktivitas Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Kabupaten Solok 1958-1961". *Skripsi*. (Padang: Fakultas Sastra Universitas Andalas, 2008) hal 53



front utara tentara pelajar yang dekat dengan Kolonel Dahlan Djambek dikenal dengan Pengawal Dahlan Djambek (PDD).<sup>14</sup>

Sebagai contoh adalah Asnil Sahim seorang mahasiswa kedokteran Unand merupakan ajudan sekaligus asisten pribadi Ahmad Husein.<sup>15</sup> Begitu juga dengan Saidal Bahauddin yang juga merupakan mahasiswa kedokteran Unand, ia menjadi pengawal dan ajudan dari Kolonel Zulkifli Lubis. Saidal Bahauddin memiliki kemampuan menyusun taktik dan strategi pertempuran yang diperolehnya secara langsung karena bersentuhan dengan divisi intelijen PRRI sebagai staf Kolonel Zulkifli Lubis.<sup>16</sup> Mahasiswa lain yang juga aktif memberikan dukungan kepada PRRI adalah seperti Bagindo Fahmi, Novyan Kaman, Saharman Iman dan lain-lain.<sup>17</sup>

Sejumlah karya ilmiah yang berkaitan dengan PRRI telah banyak ditulis orang, dan dari beberapa penulis tersebut hanya sedikit yang menyinggung masalah keterlibatan pemuda pelajar dan mahasiswa dalam PRRI. Di antaranya adalah karya Mestika Zed dan Hasril Chaniago yakni *Perlawanan Seorang Pejuang Biografi Kolonel Ahmad Husein*, buku ini mendeskripsikan pengalaman Ahmad Husein dari ia kecil sampai meninggalnya. Namun, buku ini memberikan perhatian yang lebih terhadap keterlibatannya dalam PRRI, dan dalam bagian sub bab buku ini terdapat sedikit bahasan mengenai keterlibatan pemuda pelajar dan mahasiswa dalam PRRI.

---

<sup>14</sup> Mestika Zed, *Op Cit.* hal 324

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Fajar Rusvan dan Irham, *Bang Saidal "Konsistensi Anak Zaman"*. (Jakarta: J C Institute, 2007) hal 60

<sup>17</sup> Mestika Zed, *OP Cit.* Hal 278.

Seperti sebagai pasukan lapis dua PRRI, sebagai mata-mata dan juga sebagai pengawal pimpinan PRRI.<sup>18</sup>

Literatur berikutnya adalah tulisan Gusti Asnan yang berjudul *Memikir Ulang Regionalisme Sumatera Barat Tahun 1950-an*. Buku ini memperlihatkan dinamika sejarah daerah Sumatera Barat tahun 1950-an dalam NKRI, melihat Sumatera Barat dengan pusat pemerintahan di Jakarta, membahas PRRI termasuk di dalamnya mengenai kelompok pemuda pelajar dan mahasiswa Sumatera Barat yang ikut bergabung dengan Dewan Banteng dan PRRI.<sup>19</sup> Buku lain karya RZ. Leirissa yaitu *PRRI-PERRESTA: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*, kajian buku ini memberikan penekanan pada situasi politik nasional yang menjadi sebab pergolakan daerah.<sup>20</sup> Literatur lain buku Audrey Kahin yakni *Dari Pemberontakan ke Integrasi Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*, dalam buku ini penulis menempatkan tiga bab untuk membahas PRRI yang dilihat mulai dari kekecewaan daerah terhadap pusat sampai timbulnya pemberontakan dan kalah setelah di tumpas oleh pasukan APRI.<sup>21</sup>

Dari literatur yang ada mengenai PRRI jelas bahwa belum ada yang memfokuskan pembahasan atau penelitian kepada keterlibatan dan aktivitas pemuda pelajar dan mahasiswa dalam PRRI. Padahal sebagai pasukan lapis dua PRRI,

---

<sup>18</sup> Mestika Zed dan Hasril Chaniago, *Perlawanan Seorang Pejuang Biografi Kolonel Ahmad Husein*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998)

<sup>19</sup> Gusti Asnan, *Memikir Ulang Regionalisme Sumatera Barat Tahun 1950-an*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007)

<sup>20</sup> R. Z. Leirissa, *PRRI-PERRESTA: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1991)

<sup>21</sup> Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan Ke Integrasi Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005)



pemuda pelajar dan mahasiswa ini memiliki andil yang besar dalam keberlangsungan PRRI selama 3,5 tahun bergerilya di hutan-hutan melawan tentara pusat yakni Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI). Mereka memiliki semangat juang dan loyalitas yang tinggi kepada PRRI. Melihat hal ini, karya tulis yang membahas mengenai peranan pemuda pelajar dan mahasiswa dalam PRRI bisa dikatakan belum ada dan penelitian ini juga bertujuan untuk memperkaya literatur tentang PRRI. Berdasarkan pemikiran tersebut maka muncul ketertarikan untuk mengkaji peranan golongan terpelajar ini dalam bentuk tulisan yang diberi judul: **“Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Dalam PRRI 1956-1961”**.

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Untuk lebih mengarahkan penelitian ini maka perlu ditentukan batasan-batasan yang berkaitan dengan keterlibatan pemuda pelajar dan mahasiswa dalam PRRI. Batasan temporal yang diambil adalah dari tahun 1956 sampai 1961. Tahun 1956 diambil sebagai batasan awal penelitian ini dikarenakan pada tahun ini Dewan Banteng sudah mulai menarik perhatian para pemuda pelajar dan mahasiswa dengan cara memfasilitasi kongres Pemuda Pelajar Demobilisian/ Tentara Pelajar Komando Sumatera Tengah dan dalam kongres ini para pemuda pelajar dan mahasiswa memberikan dukungan penuh atas tindakan yang diambil oleh eks-Divisi Banteng.

Batasan akhir penelitian tahun 1961, dikarenakan pada tahun ini diakhirinya permusuhan antara pusat dan daerah dengan diberikannya amnesti dan abolisi kepada

para pemberontak PRRI oleh pemerintah pusat. Selain itu keputusan mengakhiri konflik ini diambil oleh Ahmad Husein karena memikirkan masa depan generasi muda, yakni para pelajar dan mahasiswa yang setia mendukung PRRI. Batasan spasial penelitian adalah Sumatera Barat di mana hampir semua masyarakatnya bergabung dengan PRRI termasuk kalangan mudanya.

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini maka perlu dirumuskan beberapa pokok permasalahan melalui pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Pemuda pelajar dan mahasiswa mana saja yang terlibat dengan PRRI?
2. Apa-apa saja faktor yang mempengaruhi keterlibatan pemuda pelajar dan mahasiswa dalam PRRI?
3. Bagaimana proses perekrutan dan pelatihan militer yang dilakukan oleh PRRI terhadap pemuda pelajar dan mahasiswa yang bergabung dengan PRRI?
4. Bagaimana bentuk keterlibatan pemuda pelajar dan mahasiswa dalam PRRI?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu diantaranya:

1. Menjelaskan pemuda pelajar dan mahasiswa mana saja yang ikut bergabung dengan PRRI.
2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan pemuda pelajar dan mahasiswa dalam PRRI.



3. Melihat proses perekrutan dan pelatihan militer yang dilakukan oleh PRRI terhadap pemuda pelajar dan mahasiswa yang ikut bergabung.
4. Menjelaskan bentuk-bentuk keterlibatan pemuda pelajar dan mahasiswa dalam PRRI.

#### **D. Kerangka Analisis**

Ilmu politik merupakan gejala masyarakat yang terkait dengan kekuasaan, kelompok kepentingan dan partai politik, keputusan dan kebijakan, konflik dan konsensus, rekrutmen dan perilaku kepemimpinan, massa dan pemilih, budaya politik dan sosialisasi dan sebagainya. Jalannya Sejarah terutama ditentukan oleh kejadian politik, perang, diplomasi serta tindakan tokoh-tokoh politik, militer dan diplomasi.<sup>22</sup> Dalam peristiwa pergolakan daerah antara pemerintah pusat dan daerah banyak melibatkan tokoh-tokoh politik seperti M. Natsir, Syafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap serta tokoh-tokoh militer yakni diantaranya Letnan Kolonel Ahmad Husein, Kolonel Mauludin Simbolon, dan Kolonel Dahlan Djambek. Mereka memiliki peranan yang sangat besar dalam menentukan jalannya pergolakan daerah dengan pemerintah pusat.

Pemuda pelajar adalah suatu kelompok perkumpulan para pelajar dan mahasiswa dalam mengeluarkan pemikiran dan saling bertukar pendapat antara

---

<sup>22</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993). Hal 165.

mereka guna memelihara kesatuan dan persatuan perjuangan yang sangat didambakan. Dalam kata-kata ini tersimpul pengertian tidak terpecah-pecahnya pemuda dalam pelajar sekolah menengah, sekolah menengah atas dan mahasiswa semuanya bersatu dalam sebutan pemuda pelajar, di mana terkandung pengertian pemuda yang meliputi pelajar dan mahasiswa.<sup>23</sup> Pengertian kaum muda bukan sekadar mereka yang masuk kategori demografis, misalnya sebutan bagi mereka yang berumur antara 15-40 tahun, tapi juga panggilan kehormatan bagi mereka yang mempunyai citra dan ciri khas. Kaum muda identik dengan pelajar dan mahasiswa yaitu sekelompok orang yang sedang belajar di lembaga-lembaga pendidikan, sekolah dan perguruan-perguruan tinggi.<sup>24</sup>

Pelajar dan Mahasiswa menurut Knopfelmocher adalah gabungan tiga karakter yaitu muda, terpelajar dan cendekia. Karena itu pelajar dan mahasiswa memiliki citra: berpendidikan, berpengetahuan luas, mampu berfikir rasional, objektif dan kritis. Sedangkan cirinya adalah sanggup melihat kemungkinan-kemungkinan lain yang lebih baik dari apa yang sudah ada hari ini dan bergairah besar untuk menciptakan bentuk-bentuk baru yang lebih baik dan bermanfaat, berjiwa penuh gagasan-gagasan kemajuan dan selalu berupaya melakukan perubahan dan pembaharuan, bersifat independen dan terbuka (tidak Isolatif).<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Roeslan Saleh, *Kepercayaan Kepada Pelajar Pejuang Dalam Menegakkan dan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Dalam Bunga Rampai: Peran Pelajar Pejuang di Sumatera Tengah Selama Kemerdekaan*. Hal 13

<sup>24</sup> Popi Adiyas Putra, *Gerakan Kaum Muda di Bawah Tekanan Orde Baru: Studi Tentang Pelajar Islam Indonesia di Sumatera Barat 1987-1998. Skripsi*, (Padang: FSUA, 2005) hal 10.

<sup>25</sup> *Ibid.*



Menurut Taufik Abdullah pemuda bukan cuma fenomena demografis, akan tetapi juga sebuah gejala historis, ideologis dan juga kultural.<sup>26</sup> Secara ideologis mereka adalah golongan yang kritis, adaptif, serta sanggup melahirkan ide-ide baru yang dibutuhkan oleh masyarakat. Secara kultural mereka adalah produk sistem nilai yang mengalami proses pembentukan kesadaran dan pematangan identitas dirinya sebagai aktor penting perubahan.

Sebagai aktor penting perubahan para pemuda atau generasi muda ingin melihat terjadinya perubahan dan pembaharuan. Dalam hal ini adalah melihat perubahan nasib rakyat di daerah yang kurang diperhatikan oleh pemerintah pusat baik dari segi ekonomi, pendidikan maupun pembangunan daerah. Hal inilah yang membangkitkan keinginan dari para pelajar dan mahasiswa untuk berbuat lebih banyak terhadap masyarakatnya dan salah satu wadah yang tersedia waktu itu sebagai tempat penyaluran aspirasi dari pemuda pelajar dan mahasiswa yang sejalan dengan mereka adalah Dewan Banteng dan PRRI.

Maka ikut bergabunglah para pemuda pelajar dan mahasiswa dengan Dewan Banteng dan mendukung setiap keputusan yang diambil Dewan Banteng termasuk ikut terlibat dalam pergolakan PRRI dan bersedia menanggung resiko atas apa yang mereka yakini termasuk meninggalkan sekolah dan perkuliahan mereka bahkan dicap sebagai pemberontak oleh pemerintah.

---

<sup>26</sup> Taufik Abdullah, *Pemuda dan Perubahan Sosial*. ( Jakarta: LP3ES,1987).

## E. Metode dan Bahan Sumber

Penelitian ini menggunakan metode yang sesuai dengan ketentuan dan tahapan-tahapan dalam penulisan sejarah secara ilmiah. Tahapan tersebut mencakup pengumpulan sumber (heuristik), kritik, interpretasi, dan penulisan sejarah (historiografi).<sup>27</sup>

Tahapan pertama yang dilakukan adalah usaha pencarian sumber terhadap objek yang akan diteliti. Pengumpulan sumber dilakukan dengan dua cara yaitu penelitian kepustakaan dan wawancara. Sumber primer yang diperoleh adalah berupa surat keterangan yang diberikan oleh Dahlan Djambek kepada sekretarisnya agar bisa aman setelah turun gunung nanti. Surat keputusan presiden nomor 449/1961 tentang pemberian amnesti dan abolisi kepada para pemberontak. Transkrip wawancara antara JR. Chaniago dan Ahmad Husein. Sumber lisan adalah wawancara yang dilakukan dengan para pelaku sejarah yang terlibat dalam PRRI yakni pemuda pelajar dan mahasiswa seperti Syuib Ms, Asnil Sahim, dan yang lainnya.

Dalam penelitian pustaka dilakukan pencarian sumber sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian. Pencarian sumber sekunder dilakukan ke perpustakaan Jurusan Sejarah Universitas Andalas, perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Andalas, perpustakaan Universitas Negeri Padang dan perpustakaan Wilayah Sumatera Barat. Sumber yang ditemukan antara lain buku Mestika Zed dan Hasril Chaniago yang berjudul *Perlawanan seorang Pejuang*

---

<sup>27</sup> Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI Press, 1986) hal 27.



*Biografi Kolonel Ahmad Husein, dan Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1995*, buku R. Z. Leirissa *PRRI-PERRESTA: Membangun Indonesia Tanpa Komunis*, dan buku karangan Audrey Kahin *Dari Pemberontakan ke Integrasi Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*.

Tahapan kedua adalah dengan kritik sumber, kritik sumber ada dua yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern berkaitan dengan persoalan apakah sumber itu memang merupakan sumber artinya sumber sejati yang kita butuhkan. Sedangkan kritik internnya bertalian dengan persoalan apakah sumber itu dapat memberikan informasi yang kita butuhkan.<sup>28</sup> Kritik dilakukan dengan membuat perbandingan antara beberapa sumber yang telah ada sebelumnya.

Tahapan ketiga adalah interpretasi yaitu memberikan penafsiran terhadap sumber yang telah diproses melalui kritik sehingga gambaran dan proses terjadinya peristiwa mudah dipahami. Tahapan yang terakhir adalah historiografi atau penulisan sejarah, setelah semua tahapan dalam metode sejarah dilalui maka yang terakhir adalah menuangkan hasil penafsiran dari sumber-sumber yang kita peroleh dan telah melalui tahap kritik dituangkan dalam bentuk tulisan yang menggambarkan secara utuh dan sistematis tentang penelitian yang dilakukan.

---

<sup>28</sup> Nugroho Notosusanto, *Norma-norma Dasar penelitian dan Penulisan Sejarah*, (Markas Besar ABRI: Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, 1998) hal 24.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan bahasan yang sistematis, maka penelitian ini disusun dalam lima bab. Bab I merupakan bagian pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka analisis, metode penelitian dan bahan sumber serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab yang berisi bahasan mengenai proses awal terbentuknya Dewan Banteng dan mulainya pemuda pelajar dan mahasiswa melibatkan diri dengan gerakan Dewan Banteng. Bab III menjelaskan gambaran tentang alasan pemuda pelajar dan mahasiswa bergabung dengan PRRI dan melihat proses perekrutan dan pelatihan militer bagi pemuda pelajar dan mahasiswa yang bergabung dengan PRRI, serta melihat unit-unit komando pasukan pemuda pelajar dan mahasiswa.

Bab IV melihat peranan pemuda pelajar dan mahasiswa dalam PRRI sebagai pasukan lapis dua PRRI dan ikut bergerilya di hutan-hutan sampai PRRI berakhir dan melihat profil-profil pemuda pelajar dan mahasiswa yang terlibat dengan PRRI. Bab V merupakan kesimpulan dari penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.



## BAB II

### PEMUDA PELAJAR DAN MAHASISWA PADA MASA DEWAN BANTENG

#### A. Terbentuknya Dewan Banteng

Banyaknya sumber dari ketidakpuasan dan kekecewaan rakyat di daerah atas pemerintahan pusat di Jakarta menjadi penyebab timbulnya pergolakan daerah di Indonesia. Kemunculan bermacam ragam partai politik di Indonesia membawa Negara Indonesia ke dalam polarisasi masyarakat berdasarkan ide-ide dan pemahaman ideologis yang berbeda-beda dari setiap partai yang ada, sehingga pengelompokan-pengelompokan baru dalam masyarakat makin terlihat jelas, terlebih ketika pemilihan umum tahun 1955.<sup>1</sup> Partai-partai pemenang Pemilu tidak mewakili bangsa Indonesia secara keseluruhan, partai-partai seperti PNI, NU, dan PKI mendapat dukungan terbanyak di Pulau Jawa, sementara partai-partai seperti Masyumi, partai Katolik, Parkindo dan PSII mendapatkan dukungan terbanyak di luar Pulau Jawa.<sup>2</sup>

Munculnya PKI sebagai salah satu partai politik pemenang pemilu 1955 membawa pengaruh yang besar dalam perkembangan politik nasional, dan PKI mendapatkan jalan yang terbuka lebar untuk memperkuat kedudukannya di Indonesia dengan adanya prosedur politik parlementer berdasarkan UUDS 1950.<sup>3</sup> Pengaruh

---

<sup>1</sup> RZ. Leirissa, *PRRI-PERRESTA: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997). Hal 8.

<sup>2</sup> *Ibid*.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 21.

kemenangan PKI dan dampak dari rencana penerapan sistem Demokrasi Terpimpin oleh Soekarno berakibat pada retaknya hubungan Dwi Tunggal antara Soekarno dan Hatta, hal ini di pertegas dengan pengunduran diri dari Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden pada tanggal 1 Desember 1956.<sup>4</sup>

Diberlakukannya sistem pemerintahan parlementer di Indonesia membuat keadaan politik tidak stabil, dimana parlemen dengan mudah menggulingkan setiap kabinet yang ada, selama kurun waktu 1950-1957 kabinet telah berganti sebanyak enam kali yakni kabinet Natsir, kabinet Sukiman, kabinet Wilopo, kabinet Ali Sastroamidjoyo I, kabinet Burhanuddin Harahap dan Kabinet Ali Sastroamidjoyo II. Beragamnya aliran politik dalam parlemen dengan tidak adanya partai yang dominan dan tidak adanya suatu koalisi antar partai membuat kabinet menjadi rapuh. Kondisi kabinet seperti itu berdampak buruk pada pelaksanaan program kabinet terutama dalam fokus pembangunan untuk daerah kurang diperhatikan karena para elit politik dan elit pemerintahan hanya sibuk mengurus masalah mereka sendiri.<sup>5</sup>

Di dalam tubuh Angkatan Darat terjadi pula permasalahan yang cukup pelik sampai merembet ke masalah politik. Masalah tersebut yakni berkaitan dengan kebijaksanaan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) A.H Nasution yang mendukung adanya *Nederlandse Militaire Missie* (NMM) yaitu suatu kelompok militer Belanda yang diperbantukan untuk melatih TNI secara profesional sejak 1950, namun kebijakan tersebut ditentang oleh perwira lain yang dipimpin oleh Kolonel Bambang

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 26.

<sup>5</sup> Iim Imadudin, *Op Cit*. hal 27.



Supeno. Permasalahan ini mulai merembet keluar dari tubuh TNI AD, permasalahan dibawa ke parlemen dan partai politik pun mulai ikut campur, dimana Kolonel Bambang Supeno di dukung oleh partai PNI dan AH Nasution didukung oleh partai PSI. Dalam parlemen polarisasi ini dipertajam lagi dengan pembicaraan masalah intern TNI AD terutama menyinggung keutuhan korps perwira yang mulai retak.<sup>6</sup>

Permasalahan TNI dan parlemen berujung pada peristiwa 17 Oktober 1952 dimana sejumlah perwira senior TNI AD menuntut Presiden Soekarno membubarkan parlemen dan mengadakan pemilihan umum untuk memilih parlemen baru. Akibat tuntutan tersebut berujung pada pemecatan Kepala Staf Angkatan Darat A.H Nasution oleh Kabinet Wilopo. Kelompok Bambang Supeno melakukan tindakan balasan dengan melakukan pengambilalihan kedudukan panglima oleh para bawahan di TT-II/ Sriwijaya, TT-V/ Brawijaya, TT-VII/ Wirabuana. Situasi ini diperburuk oleh Menteri Pertahanan yang baru Iwa Kusumasumantri dengan mencampuri urusan intern TNI AD bahkan sampai pengangkatan para komandan batalion dan memaksa calon yang ia inginkan untuk menduduki jabatan sebagai KSAD.<sup>7</sup>

Permasalahan militer di daerah tak kalah seriusnya dibandingkan dengan permasalahan yang ada dipusat. Hal ini bermula dari rencana pemerintah untuk melakukan Rasionalisasi dan Rekonstruksi (RARE) di tubuh militer pada tahun 1948. Program ini bertujuan untuk menjadikan struktur Angkatan Bersenjata menjadi lebih

---

<sup>6</sup> RZ. Leirissa, *Op Cit.* hal 27.

<sup>7</sup> *Ibid.* hal 28.

efisien dengan merampingkan jumlah pasukan yang ada di Jawa dan Sumatera serta sekaligus untuk mengurangi beban keuangan negara.<sup>8</sup>

Kebijaksanaan Rasionalisasi dan Rekonstruksi terhadap militer dilakukan dengan proses pengurangan Divisi IX Banteng menjadi satu brigade saja yaitu Brigade Banteng yang terdiri dari empat Bataliyon. Brigade Banteng ini kemudian dipecah lagi hanya menjadi satu resimen saja yaitu Resimen IV Sumatera Barat. Jadi di Sumatera Barat hanya sepertiga jumlah pasukan Divisi Banteng yang akan dipertahankan dan selebihnya dikembalikan ke kampung halaman masing-masing.<sup>9</sup> Kekecewaan di kalangan militer di Sumatera Barat memuncak ketika diketahui bahwa hanya Divisi IX Banteng yang dihapuskan, sedangkan dua divisi TNI lainnya yang ada di Sumatera hanya mengalami perubahan nama saja menjadi Tentara Teritorium I Sumatera Utara yang berkedudukan di Medan dan Tentara Teritorium II Sumatera Selatan yang berkedudukan di Palembang.<sup>10</sup>

Banyak dari perwira Divisi IX Banteng yang tidak menerima pengurangan tersebut. Mereka mengambil langkah sendiri-sendiri, ada yang memilih untuk keluar dari dinas ketentaraan, sebagian lagi dirumahkan dan sebagian lagi tetap bertahan dengan konsekuensi dimutasikan ke wilayah lain. Para perwira yang mengundurkan

---

<sup>8</sup> Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan ke Integrasi; Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005) hal 197.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 198.

<sup>10</sup> Iim Imadudin, *Op Cit*. hal 46.



diri adalah Kolonel Ismail Lengah, Letnan Kolonel Dahlan Ibrahim dan Letnan Kolonel Abdul Halim.<sup>11</sup>

Program rekonstruksi dan rasionalisasi bukannya tanpa pertentangan dari komandemen Sumatera Mayor Jenderal Suharjo Harjowardjojo waktu itu, ia dan Panglima Divisi IX Banteng Kolonel Ismail Lengah yang juga merupakan kepala staf operasi komandemen Sumatera tidak sependapat dengan pemerintah yang terlalu menggeneralisasikan keadaan di Jawa dan Sumatera. Di Jawa jumlah tentara memang terlalu banyak dan masalah pembiayaan terlalu menggantungkan diri kepada pemerintahan,<sup>12</sup> sedangkan di Sumatera Angkatan Bersenjata tidak tergantung kepada pemerintah karena kebutuhan makanan prajurit dipasok oleh rakyat setempat dan senjata diproduksi secara lokal dan dibeli dari hasil perdagangan dengan Singapura dan Malaysia.<sup>13</sup>

Akibat dari pengurangan Divisi IX Banteng telah meluluhlantakkan kesatuan ini, banyak dari prajurit veteran perang kemerdekaan yang diberhentikan dan disuruh pulang ke kampung halaman sebagai warga sipil biasa tanpa adanya pesangon atau jaminan dari pemerintah. Pemerintah seolah-olah lupa kalau para prajurit perang ini telah dengan setia mengabdikan diri kepada republik ini, ketika agresi Belanda II terjadi di mana Soekarno dan Hatta ditawan oleh Belanda dan terjadi kekosongan kepemimpinan nasional, di daerah ini lahir Pemerintahan Darurat Republik Indonesia

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 47.

<sup>12</sup> Joni Fatria, *Dewan Banteng di Sumatera Barat 1956-1958. Skripsi* (Padang: FSUA, 1991) hal 26.

<sup>13</sup> Audrey Kahin, *Op Cit.* hal 198.

(PDRI) sebagai penyambung eksistensi Republik Indonesia dan para tentara memikul beban berat untuk melindungi PDRI dan pemimpinnya walaupun nyawa taruhannya.<sup>14</sup>

Tidak tersedianya lapangan pekerjaan akibat imbas dari konflik kepentingan di pusat pemerintahan berdampak tidak diperhatikannya masalah kehidupan ekonomi masyarakat. Padahal tenaga kerja sangat melimpah walaupun mereka tidak punya keterampilan, kebanyakan dari pencari kerja ini adalah bekas-bekas pejuang yang dikembalikan ke masyarakat. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka adalah mengadu nasib ke rantau orang, umumnya ke Jakarta dan ke kota-kota besar di Pulau Jawa. Namun tidak semuanya berhasil karena kebanyakan dari mereka tidak memiliki pendidikan dan keterampilan yang memadai, sehingga banyak dari mereka yang menjadi pengangguran. Keadaan yang memprihatinkan inilah nantinya yang menjadi pendorong sejumlah perwira bekas Divisi Banteng yang masih aktif mengadakan reuni untuk membicarakan nasib rekan-rekan mereka tersebut.<sup>15</sup>

Kekecewaan terhadap pemerintah pusat kembali meningkat di tahun 1950 mengenai kebijakan calon Gubernur Sumatera Tengah. Setelah Mosi Tan Tuah di keluarkan oleh parlemen Sumatera Tengah terhadap Gubernur Nasroen, sehingga memaksa Gubernur Nasroen meninggalkan jabatannya sebagai gubernur dan pindah ke Jogjakarta, terjadi kekosongan pemerintahan Sumatera Tengah untuk beberapa lama. Untuk mengatasi masalah kepemimpinan di Sumatera Tengah Perdana Menteri

---

<sup>14</sup> Meztika Zed, *Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1995*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1998) hal 116.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal 118.



M. Natsir melalui menteri dalam negeri Mr. Assaat menunjuk Roeslan Mulyohardjo sebagai gubernur Sumatera Tengah.<sup>16</sup>

Padahal sebelumnya DPR Sumatera Tengah telah mengirim empat orang nama calon Gubernur Sumatera Tengah yakni Ilyas Jakoeb, dr. M. Djamil, dr. A. Rahim Usman, dan Mr. St. Mohammad Rasyid. Namun semua calon yang diusulkan DPRST ditolak oleh pemerintah pusat dan menunjuk Roeslan Muljohardjo sebagai Gubernur Sumatera Tengah. DPRST menolak pengangkatan tersebut dengan mengembalikan keputusan menteri dalam negeri.<sup>17</sup>

Penolakan yang dilakukan oleh DPRST dianggap oleh pemerintah pusat merupakan sebuah pembangkangan. Melalui peraturan pemerintah No. I tahun 1951 secara resmi DPRST dibekukan. Pembekuan tersebut diberlakukan agar kehendak kementerian dalam negeri untuk meletakkan Roeslan Muljohardjo dapat dengan mudah dilaksanakan. Sejak saat itu dikatakan orang bahwa tanah Minang yang demokratis tidak memiliki alat perlengkapan demokrasi, ketika gubernur memerintah Sumatera Tengah tanpa adanya dewan perwakilan rakyat sebagai sebuah lembaga tempat menyuarakan aspirasi rakyat.<sup>18</sup> Usaha untuk mengaktifkan kembali DPRST pernah dilakukan oleh pemimpin partai politik dan masyarakat Sumatera Tengah, namun usaha tersebut gagal karena tidak adanya perhatian dari pemerintah karena

---

<sup>16</sup> Iim Imadudin, *Op Cit.* hal, 50.

<sup>17</sup> *Ibid.* hal 49

<sup>18</sup> Mestika Zed, *Op Cit.* hal 120

sering jatuhnya kabinet sehingga lebih kurang lima tahun Sumatera Tengah tidak memiliki dewan perwakilan.<sup>19</sup>

Persoalan yang berkaitan erat dengan banyak sumber ketidakpuasan dan kekecewaan ini mulai dari persoalan lokal, ketidakpuasan dikalangan perwira, sampai kepada kemacetan sistem politik pasca revolusi membawa daerah semakin tidak sabar untuk mengambil inisiatif sendiri.<sup>20</sup>

Keprihatinan melihat nasib rekan-rekan sesama pejuang dulu yang terkena dampak dari kebijakan RARE yang mendorong mantan anggota Divisi IX Banteng mengadakan reuni. Dalam reuni eks Divisi Banteng permasalahan yang dibahas tidak hanya sebatas masalah Veteran Perang Kemerdekaan saja, tetapi juga menyangkut persoalan nasional. Dari sekian banyak makalah, pidato dan komentar yang disampaikan oleh peserta reuni yang disampaikan dengan rasa gusar dan kurang puas. Lahirlah sebuah keputusan yang berani antara lain menuntut perbaikan-perbaikan dalam pimpinan angkatan darat dan dalam pimpinan negara.<sup>21</sup>

Acara reuni anggota eks Divisi Banteng diprakarsai oleh Yusuf Nur dan Jamhuri Samin dari Akademi Hukum Militer, Badar Gafur dari Pusat Pendidikan Infanteri dan Purnawirawan Ramawi Azwar seorang pengusaha swasta, reuni ini dilaksanakan pada tanggal 21 September 1956 di Studio Persari Jakarta. Bekas anggota-anggota Divisi Banteng yang hadir pada pertemuan ini berjumlah 123 orang,

---

<sup>19</sup> Audrey Kahin, *Op Cit.* hal 263

<sup>20</sup> Mestika Zed, *Op Cit.* hal 132

<sup>21</sup> Letkol. (purn) Soeib, Era Eksperimen Politik Dari Presiden Soekarno 1956-1966. *Dalam Kontroversi Sejarah di Indonesia.* Ed, Syamdani. (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001)



kebanyakan dari Jakarta, seorang dari Bandung dan yang datang dari Sumatera Tengah terdiri dari: Letkol Ahmad Husein (Komandan Resimen Infanteri 4 ), Kapten Nurmatias (Komandan Batalyon 140 Resimen Infanteri 4), Lettu Bustanuddin (Staf resimen Infanteri 4), Komaruddin Dt. Machudum (eks Kapten), dan Soelaiman (eks Mayor ALRI ).<sup>22</sup>

Dalam pertemuan yang diadakan di Jakarta disepakati akan dibentuk suatu panitia yang akan mengkoordinir pelaksanaan reuni dan tempat pembentukan panitia dipilih kota Padang. Pada tanggal 11 Oktober 1956 yang akan bertempat di Gedung Kencana dilaksanakan rapat untuk pengesahan panitia reuni eks Divisi Banteng. Sebagai ketua panitia ditunjuk Letkol Ahmad Husein dan dibantu oleh beberapa anggota panitia diantaranya Kapten Abu Nawas, Mayor Soelaiman, Sjoefjan Ibrahim, Kapten Zainal, dan lain-lain. Dalam rapat ini juga disepakati agar peserta berpangkat Pembantu Letnan Satu ke atas dipungut biaya Rp. 50,-per orang untuk kepentingan reuni, bahkan ada yang menyumbang antara Rp. 500,- sampai Rp. 2.500,-.<sup>23</sup>

Reuni akbar eks Divisi Banteng akhirnya dilaksanakan di Balai Prajurit Padang dari tanggal 21-24 November 1956. Reuni ini dihadiri oleh 612 orang anggota eks Divisi Banteng, baik yang masih aktif di TNI, Kepolisian, Pejabat Pemerintahan, ninik mamak dan eks anggota militer, mereka berdatangan dari

---

<sup>22</sup> AH. Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas. Jilid IV: Masa Panca Roba Kedua*. (Jakarta: Gunung Agung, 1984) hal 57.

<sup>23</sup> M. Halwi Dahlan dkk, *Dari Dewan Banteng ke PRRI, Kemiripan Sejarah Yang Berulang di Era Reformasi*. (Padang: BKSNT,2000) hal 24.

berbagai daerah seperti Jakarta, Medan, Aceh, Palembang, Bandung dan dari Sumatera Tengah Sendiri. Dalam reuni ini dilaksanakan kegiatan ceramah yang menampilkan tokoh-tokoh seperti Kolonel Ismail Lengah, Letkol Ahmad Husein, Djamhuri Djamin, Kolonel Dahlan Djambek dan Dahlan Ibrahim.<sup>24</sup>

Pelaksanaan reuni ini menghasilkan beberapa ketetapan sebagai berikut:

#### I. Pokok-pokok Perjuangan Reuni

- a. Penyelesaian persoalan-persoalan dalam negara yaitu menuntut dilaksanakannya segera perbaikan yang progresif dan radikal di segala lapangan terutama dalam pimpinan Angkatan Darat, seterusnya di dalam pimpinan negara dengan jaminan-jaminan demi keutuhan Negara Republik Indonesia.
- b. Penyelesaian persoalan-persoalan dalam taraf daerah yakni menuntut segera diselenggarakannya pemberian otonomi luas dalam bentuk dan isi kepada daerah Sumatera Tengah sesuai dengan perkembangan-perkembangan yang ada.

#### II. Aspek Sosial dan Ekonomi Daerah

Menuntut dihapuskannya segera sistem sentralisme yang dalam kenyataannya mengakibatkan birokrasi yang tidak sehat dan juga menjadi pokok pangkal korupsi, stagnasi pembangunan daerah, hilangnya inisiatif dan kegiatan daerah serta kontrol daerah.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> R.Z. Leirissa, *Op Cit.* hal 40-41.



Untuk melaksanakan program yang telah dikeluarkan oleh reuni ex Divisi Banteng ini maka dibentuklah suatu wadah sebagai pelaksana program yakni Dewan Banteng. Dewan Banteng bertugas melaksanakan segala sesuatu yang telah menjadi keputusan reuni ex Divisi Banteng dan nantinya akan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada reuni II. Namun reuni II mantan Divisi Banteng tidak pernah terlaksana sehingga tidak ada laporan pertanggungjawaban dari Dewan Banteng.<sup>26</sup>

Dalam reuni ex Divisi Banteng tema sentral yang diusung adalah pembangunan bagi masyarakat di Sumatera Tengah, jadi untuk memuluskan program pembangunan tersebut semua kalangan dirangkul oleh Ahmad Husein sebagai pengurus dalam Dewan Banteng termasuk kalangan di luar unsur militer seperti ninik mamak yang diwakili oleh Dt. Simaradjo, di kalangan kelompok agama diwakili oleh syekh Musa Parabek, dari unsur pemerintahan diwakili oleh A. Abdul Manaf (Bupati Kabupaten Marangin Jambi), Saidina Ali (Kepala Jawatan Sosial Kabupaten Kampar Riau), H. Darwis Taram Dt. Tumanggung (Bupati 50 Kota) dan Ali Luis.<sup>27</sup>

Rencana yang telah disusun ketika reuni ex Divisi Banteng diteruskan kepada Gubernur Ruslan Mulyohardjo. Di tingkat pusat usulan dan tuntutan yang diajukan daerah tidak mendapatkan tanggapan yang memuaskan dari pemerintah pusat. Pengabaian oleh pemerintah pusat dianggap oleh daerah bahwa pemerintah pusat tidak memberikan perhatian pada perbaikan nasib rakyat di daerah. Untuk

---

<sup>26</sup> Ahmad Kusasi, *Aktivitas PRRI di Kabupaten Solok 1958-1961. Skripsi* (Padang: FSUA, 2008) hal 39.

<sup>27</sup> *Ibid*, hal 40.

merealisasikan program yang telah disusun pada reuni ex Divisi Banteng maka dirasa sangat perlu tugas yang berat tersebut diberikan kepada seseorang yang memang paham maksud dan tujuan yang hendak dicapai dari hasil reuni ex Divisi Banteng tersebut. Maka dari itu kekuasaan gubernur di Sumatera Tengah diambil alih dari Gubernur Ruslan Mulyohardjo dan diserahkan kepada Ahmad Husein pada tanggal 20 Desember 1956 di Bukittinggi.<sup>28</sup>

#### **B. Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Mendukung Dewan Banteng**

Dewan Banteng yang telah menerima kendali pemerintahan Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Mulyohardjo dengan mengusung tema pembangunan daerah telah memperoleh simpati yang luas di wilayah ini khususnya Sumatera Barat. Dukungan yang besar berasal dari masyarakat, kalangan elit tradisional dan dari kalangan muda yakni pelajar dan mahasiswa. Semua lapisan masyarakat menyambut dengan antusias program-program yang diusung oleh Dewan Banteng.

Bahkan tindakan Dewan Banteng untuk untuk melaksanakan sendiri program-programnya mendapatkan dukungan dari M. Yamin. M. Yamin dalam pidatonya di parlemen tahun 1957 dalam rapat dengar pendapat dengan pemerintah menyatakan tindakan yang diambil oleh Dewan Banteng merupakan inisiatif dari

---

<sup>28</sup> M. Halwi Dahlan, dkk. *Op Cit*, hal 32.



rakyat daerah untuk memimpin nasib sendiri karena melihat keadaan masyarakat yang masih menderita setelah lebih dari sepuluh tahun Indonesia merdeka.<sup>29</sup>

M. Yamin memberikan gambaran perbedaan nyata pembangunan yang terjadi antara daerah luar Jawa dengan di pusat kekuasaan yakni Pulau Jawa. M. Yamin mengambil contoh keadaan di lapangan lalu lintas, perumahan, pengajaran, perdagangan dan transmigrasi. Perbedaan pembangunan terlihat jelas dalam pernyataan M. Yamin berikut:

...siapa yang pernah melihat di jalan auto atau autostrada di pulau Jawa yang berpuluh kilometer panjangnya dan setelah itu mengalami perjalanan di Sumatera Tengah, maka dia akan menangis melihat perbedaan. Timbul perasaan sama merdeka dan berlainan nikmat. Jalan raya antara Muaro Labuah dan Kerinci dan jalan kereta api di Tanah Kuantan telah hilang di makan rimba raya, jalan raya Padang-Kerinci penuh dengan lobang-lobang yang kadang-kadang ditutupi kalau tamu agung datang berkunjung dari Jakarta. Di bidang perumahan, berapa ratus rumah adat, rumah biasa, warung, dan kedai rakyat yang telah dibakar Belanda dan dibumihanguskan oleh kita sendiri selama kita menegakkan kemerdekaan dengan senjata. Setelah pulang dari hutan pergi bergerilya pada tahun 1950, rakyat terpaksa kadang-kadang tidur diatas bumi yang tidak beratap. Tetapi rakyat tidak menyesal dan kembali mendirikan rumah dan warung mereka, namun pemerintah tidak memperhatikan mereka dengan tidak adanya sumbangan barang sehelai papan, paku barang sebatang pun. Sementara di Pulau Jawa berdiri beratus-ratus gedung baru dan mentereng.<sup>30</sup>

Bung Hatta dalam kunjungannya ke Sumatera Tengah juga telah melihat perkembangan yang nyata dari pembangunan yang dilancarkan oleh Dewan Banteng. Fasilitas umum seperti jalan-jalan raya telah diperbaiki, pengairan dan sekolah-

---

<sup>29</sup> M. Yamin, *Dewan Banteng Contra Neo Ningrat*. (Jakarta: LPPM Tan Malaka, 2009) hal 4.

<sup>30</sup> *Ibid*, hal 18.

sekolah telah disempurnakan<sup>31</sup>. Masyarakat bahu-membahu menyukseskan program-program Dewan Banteng demi kemajuan dan kepentingan mereka sendiri. Pembangunan yang telah dihasilkan masa Dewan Banteng memberikan inisiatif tersendiri pada Masyarakat untuk menamai hasil dari pembangunan tersebut dengan nama Dewan Banteng, seperti “Jalan Dewan Banteng”, “Sekolah Dewan Banteng”, “Poliklinik Dewan Banteng” dan “Mesjid Dewan Banteng”.<sup>32</sup>

Dukungan kepada Dewan Banteng tidak hanya datang dari masyarakat saja, akan tetapi juga mendapatkan dukungan penuh dari kalangan muda yakni pelajar dan mahasiswa Sumatera Tengah. Dukungan tersebut terlihat jelas pada kongres Pelajar Demobilisian atau Tentara Pelajar Komando Sumatera Tengah yang diadakan di Padang pada tanggal 11 sampai 13 Desember 1956. Salah satu hasil keputusan kongres adalah mendukung segala tindakan yang diambil oleh reuni ex-Divisi Banteng. Ketika Ahmad Husein mengambil alih pemerintahan di Sumatera Tengah dari Gubernur Roeslan Moelyohardjo juga mendapatkan dukungan dari mahasiswa dan pemuda yang mayoritas berasal dari Sumatera Barat.<sup>33</sup>

Kedekatan kalangan pemuda pelajar dan mahasiswa dengan Dewan Banteng terjadi karena banyak dari staf pengajar dari lembaga-lembaga pendidikan yang ada

---

<sup>31</sup> Redi Rahmat dkk, *Tantangan dan Rongrongan Terhadap Keutuhan dan Kesatuan Bangsa: Kasus PRRI*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat sejarah dan Nilai Tradisional. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1992) hal 174.

<sup>32</sup> *Transkrip rekaman wawancara* antara JR. Chaniago dengan Ahmad Husein. *Transkrip* oleh Mestika zed dan Hasril Chaniago. 1999.

<sup>33</sup> Gusti Asnan, *Memikir Ulang Regionalisme Sumatera Barat Tahun 1950-an*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007) hal 40.



di Sumatera Barat tersebut umumnya juga terjun dalam pergerakan politik. Perkenalan pemuda pelajar dan mahasiswa dengan gerakan Dewan Banteng karena mereka sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh staf pengajar dari kampus-kampus mereka. Dari situlah pemuda pelajar dan mahasiswa berkenalan dengan dunia politik termasuk nantinya bergabung dengan Dewan Banteng, di antara dosen-dosen yang terjun ke dunia politik tersebut adalah Prof. Mr. Hazairin, Muhammad Yunus dan Mr. St. Harun Al-Rasyid.<sup>34</sup>

Pemuda pelajar dan mahasiswa di Sumatera Barat juga sudah bisa menilai hal-hal yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpin waktu itu dan mendapatkan sambutan yang luas dari masyarakat, melihat sambutan dari masyarakat banyak tersebut maka pelajar dan mahasiswa pun memilih untuk melibatkan diri dalam Dewan Banteng. Pemimpin-pemimpin politik di daerah juga memiliki tujuan dan cita-cita untuk mensejahterakan rakyat. Perhatian serius juga ditunjukkan oleh pemuda pelajar dan mahasiswa terhadap adanya pandangan-pandangan politik dan pidato-pidato yang disampaikan oleh Dahlan Djambek seorang perwira tinggi dalam kemiliteran dan aktif dalam menentang keberadaan komunis di Indonesia, ia sekaligus pendiri dari Gerakan Bersama Anti Komunis di Sumatera Barat. Pada berbagai kesempatan Dahlan Djambek aktif mengkampanyekan gerakannya ini dan memberikan semangat kepada para pelajar dan mahasiswa untuk menentang keberadaan komunis serta menganggap bahwa pemerintah telah dipengaruhi oleh PKI

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal 43.

dan menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah berlaku tidak adil terhadap daerah, dan menganaktirikan keberadaan Sumatera.<sup>35</sup>

Pengambilalihan pemerintah daerah ini mendapat dukungan dari Dewan Mahasiswa Sumatera Tengah yang terdiri dari senat Fakultas Pertanian, Fakultas Kedokteran, Perguruan Tinggi Pendidikan Guru, dan Fakultas Hukum dan Masyarakat. Mahasiswa-mahasiswa tersebut mengeluarkan pernyataan sikap yakni:

1. Mendukung dengan sepenuhnya dan berdiri dengan segala teguh konsekuen di belakang putusan-putusan yang telah dan akan diambil oleh Dewan Banteng yang didukung oleh lapisan masyarakat.
2. Turut menyetujui dan menyokong sepenuhnya segera disempurnakan pembangunan pengajaran rendah, lanjutan pertama, lanjutan atas dan segera diberikan otonomi kepada tiap-tiap universitas di seluruh Indonesia.
3. Membentuk Biro Pengerahan Tenaga Mahasiswa Sumatera Tengah untuk menggerakkan tenaga mahasiswa dalam segala lapangan kemasyarakatan yang membutuhkannya.
4. Waspada dan siap sedia menghadapi segala kemungkinan yang timbul sebagai akibat dari pernyataan ini.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Saharman Leman. Padang, 5 Juli 2011.

<sup>36</sup> Gusti Asnan, *Op Cit.* Hal 42.



Dalam pelaksanaan program-program yang telah dihasilkan pada reuni ex-Divisi Banteng, maka ketua Dewan Banteng selaku pemegang pemerintahan daerah membentuk Tim Assistensi yang akan membantu tugas ketua daerah. Tim Assistensi terdiri dari beberapa buah seksi. Seksi A diketuai oleh M. Syafe'i membawahi bidang kependidikan, sosial, kesehatan dan keamanan. Seksi B membawahi pekerjaan umum dan tenaga, irigasi dan perhubungan diketuai oleh Mr. Abu Bakar Djaar. Seksi C membawahi bidang ekonomi dan pembangunan diketuai oleh Marah Adin. Seksi D membawahi bidang keuangan diketuai oleh Mr. Egon Hakim. Terakhir seksi E membawahi bidang informasi, penerangan dan propaganda diketuai oleh Soeleiman.<sup>37</sup>

Pada Tim Assistensi seksi A yang membawahi pendidikan, sosial, kebudayaan dan kesehatan diberikan jatah satu kursi kepada mahasiswa. Dewan Mahasiswa Sumatera Tengah menunjuk Marah Sofjan dari Fakultas Hukum/ Pengetahuan Masyarakat untuk duduk di Tim Assistensi A tersebut. Marah Sofjan ikut dibantu oleh sejumlah mahasiswa lain yaitu sofyan Muchtar, Novyan Kaman, Herman Sihombing, Yulizar Rasyid, Rusli Aman, Abdul Azis, Idris Ja'far dan Narat Ginting. Dewan Banteng ingin melibatkan mahasiswa secara aktif dalam gerakkannya.<sup>38</sup>

Dewan Mahasiswa Universitas Andalas yang terdiri dari presidium M. Ridah Malik dari Fakultas Pertanian, anggota presidium Djohari Kahar dari Fakultas

---

<sup>37</sup> Joni Fatria, *Op Cit.* hal 36

<sup>38</sup> Gusti Asnan, *Op Cit.* hal, 42.

Hukum, Delian Bachtar dari PTPG, Army BK dari Fakultas Kedokteran, Kamaruddin dari FIPIA, dan Sekretaris Jendral (Sekjend) mahasiswa Asnil Sahim mengukuhkan keterlibatan mereka serta mengatakan turut berdiri di belakang Dewan Banteng serta rela menerima segala konsekuensi atas dukungan yang diberikan tersebut.<sup>39</sup>

Dukungan dari pelajar dan mahasiswa Sumatera Tengah dipertegas dengan adanya kongres pelajar dan mahasiswa Sumatera Tengah se-Indonesia yang dihadiri oleh berbagai perwakilan pelajar dan mahasiswa Sumatera Tengah dari berbagai daerah di Indonesia. Utusan-utusan yang datang berasal dari Jakarta, Bandung, Solo, Yogyakarta, Surabaya dan Riau. Kongres yang dilaksanakan tanggal 17-23 Agustus 1957 menghasilkan beberapa keputusan, di antaranya:

1. Dapat membenarkan dan menyokong ide dan gerakan daerah yang mengandung kebenaran-kebenaran demi kebaikan revolusi nasional 1945 pada batas fungsi selaku pelajar dan mahasiswa.
2. Tidak dapat membenarkan tuduhan-tuduhan yang mengatakan gerakan daerah sebagai separatis, sukuisme atau aksi subversif.
3. Supaya ketegangan yang timbul antara daerah dan pusat diselesaikan dengan musyawarah, dengan pengertian kedua belah pihak dengan kesungguhan, kerelaan dan sikap harga menghargai.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid*, dan Wawancara dengan Asnil Sahim. Padang 22 Juni 2011

<sup>40</sup> *Ibid*, hal 41.



Keluarnya pernyataan dari pelajar dan mahasiswa untuk mendukung Dewan Banteng memberikan tanda bahwa pelajar dan mahasiswa juga menginginkan keadaan daerah yang lebih baik dari berbagai segi kehidupan, untuk kemajuan pembangunana di daerah. Juga karena suatu bentuk kecintaan mereka kepada tanah leluhurnya.

Masa pemerintahan Dewan Banteng pelajar dan mahasiswa juga aktif mensosialisasikan program-program Dewan Banteng ke masyarakat melalui ceramah-ceramah dan khutbah-khutbah di mesjid-mesjid dan di surau-surau. Ketika pergolakan daerah berujung kepada PRRI, mahasiswa ikut terjun dalam memobilisasi massa untuk menentang kebijakan pemerintah pusat.<sup>41</sup>

Dukungan yang diberikan oleh pemuda pelajar dan mahasiswa juga dilakukan dalam bentuk aksi demonstrasi yang dilakukan pemuda pelajar dan mahasiswa ketika menyambut kedatangan Perdana Menteri Djuanda yang datang berkunjung ke Padang. Para demonstran memenuhi Bandar Udara Tabing dan sepanjang jalan yang akan dilalui oleh Djuanda dan rombongannya. Dalam demonstrasi tersebut para pemuda pelajar dan mahasiswa serta pendukung Dewan Banteng lainnya menuntut agar pusat mengakui tindakan Dewan Banteng, agar pusat memenuhi tuntutan Dewan Banteng, serta faktor Hatta jangan diabaikan dalam penyelesaian persoalan daerah.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Israr, *Peranan HMI Dalam Aksi-aksi Menentang G 30 S/PKI di Kota Padang 1965-1968. Skripsi*, (Padang: FSUA, 1999) hal 23.

<sup>42</sup> Gusti Asnan, *Op Cit.* hal 186.

Salah satu kegiatan nyata yang dilakukan oleh mahasiswa Sumatera Tengah pada tahun 1957 adalah mengirim utusan ke Bandung, di sana sedang diadakan dialog dengan mengundang Bung Karno dan Bung Hatta. Tujuan dari pertemuan yang diselenggarakan di ITB Bandung adalah untuk menyatukan kembali Dwi Tunggal Soekarno-Hatta, agar Indonesia tidak terpecah belah. Namun Hatta sangat kokoh pendiriannya, dia tidak bisa lagi bersatu dengan Soekarno.<sup>43</sup>



---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Asnil Sahim. Padang, 22 Juni 2011.



### BAB III

## PEMUDA PELAJAR DAN MAHASISWA BERGABUNG DENGAN PRRI

### A. Alasan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Bergabung Dengan PRRI

Awal tahun 1958 keadaan antara daerah-daerah yang bergolak dengan pemerintah pusat mencapai puncaknya. Bermula dari pertemuan tokoh-tokoh sipil dan militer di Sungai Dareh pada tanggal 9 Januari 1958, di antara tokoh-tokoh yang hadir adalah Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Mauludin Simbolon, Kolonel Dahlan Djabat, Letnan Kolonel Ahmad Husein, Mohammad Natsir, Mr. Syafruddin Prawiranegara, dan Dr. Sumitro Djojohadikusumo. Pada pertemuan ini keluar sebuah kesimpulan bahwa pemerintah pusat sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk memperbaiki keadaan daerah, sehingga perlu diberikan sebuah ultimatum kepada pemerintah pusat.<sup>1</sup>

Maka pada tanggal 10 Februari 1958, Letnan Kolonel Ahmad Husein selaku ketua Dewan Banteng sekaligus Dewan Perjuangan membacakan sebuah ultimatum kepada pemerintah pusat. Isi dari ultimatum tersebut adalah;

1. Agar kabinet Djuanda dalam kurun waktu 5 X 24 jam menyerahkan mandatnya.
2. Supaya Muhammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX ditunjuk sebagai formatur untuk membentuk kabinet baru.

---

<sup>1</sup> M. Halwi Dahlan Dkk, *Dari Dewan Banteng ke PRRI, Kemiripan Sejarah Yang Berulang di Era Reformasi*. (Padang: BKSNT, 2000), hal 46.

3. Supaya kabinet baru diberi kesempatan sepenuhnya untuk bekerja sampai diadakan pemilihan umum berikutnya.
4. Agar presiden Soekarno atau pejabat presiden RI membatasi diri menurut konstitusi.
5. Apabila tuntutan di atas tidak dipenuhi maka kami akan mengambil langkah kebijaksanaan sendiri-sendiri.<sup>2</sup>

Namun ultimatum yang disampaikan oleh daerah terhadap pemerintah pusat ditolak keras oleh kabinet Djuanda serta memerintahkan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) AH. Nasution memecat langsung dan menangkap para Kolonel yang berada di belakang dewan tersebut. Yaitu Ahmad Husein, Zulkifli Lubis, Ventje Sumual, Mauludin Simbolon. Kebijakan tersebut diumumkan melalui RRI hari berikutnya oleh PM Djuanda dan diikuti dengan pembekuan Komando Daerah Militer Sumatera Tengah (KDMST) serta memutus hubungan darat dan udara dengan Sumatera Tengah.

Penolakan keras terhadap ultimatum oleh kabinet Djuanda membuat daerah memilih jalan yang lebih ekstrim yakni diumumkannya pemerintahan tandingan yaitu Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada tanggal 15 Februari 1958 yang diumumkan oleh Ketua Dewan Perjuangan Ahmad Husein dan berkedudukan di Bukittinggi. Pada saat itu juga dikeluarkan ketetapan bahwa kabinet Djuanda dinyatakan bubar dan menolak konsep Demokrasi Terpimpin Soekarno serta

---

<sup>2</sup> Gusti Asnan, *Memikir Ulang Regionalisme Sumatera Barat Tahun 1950-an*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hal 190.



menjalankan pemerintahan berdasarkan kepada piagam perjuangan. Dewan perjuangan juga menyatakan tidak wajib taat lagi kepada Presiden Soekarno.<sup>3</sup>

Pada saat itu juga diumumkan kabinet PRRI dengan susunan sebagai berikut:

Mr. Syafruddin Prawiranegara	Perdana Menteri PRRI/ Menteri Keuangan
Mauludin simbolon	Menteri Luar Negeri
Kolonel Dahlan Djambek	Menteri Dalam Negeri
Mr. Burhanuddin Harahap	Menteri Pertahanan/ Menteri Kehakiman
Dr. Sumitro Djojohadikusumo	Menteri Perhubungan dan Pelayaran
Engku M. Syafe'I	Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan/ Menteri Kesehatan
Kolonel JF. Warouw	Menteri Pembangunan
Saladin Sarumpaet	Menteri Pertanian dan Perburuhan
Mochtar Lintang	Menteri Agama

Diumumkannya PRRI menimbulkan reaksi yang beragam di Indonesia, banyak pihak yang mengecam keras tindakan yang diambil oleh daerah tersebut, bahkan PKI terang-terangan mengatakan bahwa tindakan pembentukan PRRI merupakan pengkhianatan terhadap Negara Republik Indonesia.<sup>4</sup> Namun ada juga pihak yang mendukung keberadaan PRRI yaitu hampir sebagian besar masyarakat

---

<sup>3</sup> M. Halwi Dahlan dkk, *Op Cit.* hal 49.

<sup>4</sup> Soeripto Putera Djaja, *Kegagalan Pemberontakan Husein cs.* (Surabaya: Fa Penerbitan GRIP, 1958), hal 47.

Sumatera Barat, tidak terkecuali kalangan mudanya. Bahkan Perjuangan Rakyat Semesta (PERMESTA) di Sulawesi menyambut keberadaan PRRI.

Dukungan yang diberikan oleh masyarakat Sumatera Barat terhadap PRRI tidak terlepas dari rasa simpati masyarakat kepada perjuangan Dewan Banteng sebelumnya, di mana Dewan Banteng telah berhasil membangun daerah bersama-sama dengan rakyat untuk memajukan masyarakat di daerah.<sup>5</sup> Kata pembangunan telah menyihir masyarakat Sumatera Barat untuk memberikan dukungan penuh terhadap Dewan Banteng, dan hasil pembangunan tersebut pun bisa dilihat; jalan-jalan diperbaiki, bahkan jalan-jalan baru pun dibuka untuk menghubungkan satu daerah dengan daerah lain, dan sekolah-sekolah disempurnakan dan dibuka baru.

Hasil pembangunan yang dilakukan oleh Dewan Banteng bahkan mendapatkan tanggapan dari Bung Hatta. Bung Hatta mengatakan bahwa jalan yang delapan bulan yang lalu ia lalui ketika menghadiri pembukaan Universitas Andalas tidak bagus dan penuh dengan lobang-lobang sehingga sulit dilewati oleh kendaraan, sekarang sudah bisa dilewati dengan lancar oleh suatu rombongan yang terdiri dari berpuluh-puluh mobil. Dahulu sebelum adanya program yang diluncurkan oleh Dewan Banteng ia mendapati rakyat yang apatis, namun sekarang setelah Dewan Banteng menjalankan pembangunan maka yang terlihat hanya jiwa rakyat yang dinamis dan menginginkan perbaikan dalam segi kehidupan dan penghidupan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Umar Daud. Salimpauang, 3 April 2011.

<sup>6</sup> Redi Rahmat, dkk. *Tantangan dan Rongrongan Terhadap Keutuhan dan Kesatuan Bangsa: Kasus PRRI*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1992), hal 175.



Melihat hasil yang telah dicapai oleh Dewan Banteng dalam pembangunan di Sumatera Tengah ini lah maka rakyat memberikan dukungan kepada PRRI. Namun reaksi Pemerintahan pusat di Jakarta sangat keras, yakni memilih jalan konfrontasi langsung dengan pihak PRRI. Pemerintah pusat membentuk pasukan khusus untuk menumpas PRRI di Sumatera Barat, yakni dengan nama Operasi 17 Agustus.<sup>7</sup>

Reaksi jelas juga ditunjukkan oleh pemuda pelajar dan mahasiswa Sumatera Barat terhadap keberadaan PRRI. Setelah Ahmad Husein mengumumkan terbentuknya PRRI pada 15 Februari 1958, para pemuda pelajar dan mahasiswa Sumatera Barat melakukan apel besar untuk mendukung Ahmad Husein dan PRRI. Pemuda pelajar dan mahasiswa ini menggalang massa untuk memberikan dukungan terhadap ultimatum yang disampaikan oleh daerah terhadap pemerintah pusat. Para pelajar dan mahasiswa yang terlibat aktif dalam menggalang massa antara lain Bagindo Fachmi, Asnil Sahim, Novyan Kaman, Saharman Leman, Saidal Bahaiddin dan lain-lain.<sup>8</sup> Para pemuda juga mengorganisasikan diri dalam Badan Kontak Aksi Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Sumatera Tengah (BKAPPM-ST), yang tugasnya mengkoordinir massa dalam setiap diadakannya rapat-rapat raksasa untuk mendukung Dewan Banteng dan PRRI.<sup>9</sup>

Pada tanggal 20 Februari 1958 di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat sekarang berkumpul massa yang berjumlah sekitar 40.000 orang yang kebanyakan terdiri dari pemuda pelajar dan mahasiswa Sumatera Barat. Dalam rapat raksasa

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Umar Daud. Salimpaung, 3 April 2011.

<sup>8</sup> Mestika Zed dan Hasril Chaniago, *Perlawanan Seorang Pejuang: Biografi Kolonel Ahmad Husein*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998) hal 278.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Zainal Kahar. Padang, 9 Juli 2011.

tersebut Ahmad Husein menyampaikan pidatonya berkaitan dengan langkah-langkah yang telah diambil oleh Dewan Perjuangan dan bertekad meneruskan perjuangan untuk membangun daerah dan melawan kezaliman penguasa.<sup>10</sup> Kepada massa yang hadir pada rapat raksasa tersebut Ahmad Husein menyatakan sikapnya bahwa tujuan perjuangannya tidak lain tidak bukan adalah membangun bersama dengan rakyat, agar hasil kemerdekaan dengan cepat dapat dinikmati secara bersama-sama. Jika rakyat ingin Ahmad Husein ditangkap maka ia pun bersedia ditangkap saat itu juga, dan ia pun melemparkan tanda pangkatnya ke tanah.<sup>11</sup>

Pada kesempatan tersebut juga Bagindo Fachmi dan Novyan Kaman naik ke atas panggung dan kembali memasang tanda pangkat di bahu Ahmad Husein dan mengangkat Ahmad Husein sebagai panglima dan menaikkan pangkatnya menjadi Kolonel. Bagindo Fachmi pun menyatakan kesiapan para pemuda pelajar dan mahasiswa yang hadir pada saat itu siap mengangkat senjata bersama-sama dengan Ahmad Husein melawan pemerintah pusat.<sup>12</sup>

Dukungan besar yang diberikan oleh para pemuda pelajar dan mahasiswa Sumatera Tengah terhadap Dewan Banteng sebenarnya tidak terlepas dari rasa ingin memajukan kampung halaman, dan juga melihat kehidupan masyarakat sejahtera. Ketika Dewan Banteng berujung kepada PRRI, pemuda pelajar dan mahasiswa ini tetap loyal kepada Ahmad Husein dan ingin bersama-sama berjuang walaupun harus berhadapan langsung dengan pemerintah pusat. Bahkan dukungan dari pelajar dan

---

<sup>10</sup> Mestika zed dan Hasril Chaniago. *Op Cit.*

<sup>11</sup> *Ibid*, dan *Wawancara* dengan Azhar Muhammad. Padang, 24 Juni 2011, dan *Wawancara* dengan Syuib MS. Padang, 5 Mei 2011.

<sup>12</sup> *Ibid*.



mahasiswa ini tidak hanya berasal dari pelajar dan mahasiswa yang ada di wilayah Sumatera Barat saja, akan tetapi juga berasal dari pelajar dan mahasiswa Sumatera Barat yang bersekolah di wilayah Indonesia lain terutama di Pulau Jawa.<sup>13</sup>

Banyak dari pelajar dan mahasiswa ini memilih pulang kampung dan mendukung keberadaan PRRI dan ikut berjuang mengangkat senjata dengan PRRI. Diperkirakan sekitar 400 orang mahasiswa yang berada di luar Sumatera Barat kembali pulang ke Padang dan bergabung dengan pelajar dan mahasiswa yang telah terlebih dahulu bergabung dengan PRRI.<sup>14</sup> Mahasiswa yang pulang kampung terutama yang bersekolah di Pulau Jawa seperti dari Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta, Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Bandung (ITB) dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

Menurut Ali Amsar salah seorang mahasiswa yang ikut pulang kampung dari Jawa mengatakan bahwa salah satu tujuan para mahasiswa di Jawa tersebut pulang kampung adalah untuk mendukung perjuangan PRRI. Para mahasiswa tersebut ada yang pulang kampung secara massal atau rombongan dan mereka berlabuh di Teluk Bayur dan berjalan kaki menemui Ahmad Husein serta menyatakan kesiapan mereka untuk mempertahankan tanah kelahirannya.<sup>16</sup> Bahkan juga ada mahasiswa yang

---

<sup>13</sup> Mestika Zed dan Hasril Chaniago, *Op Cit.* hal 297

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 298.

<sup>15</sup> Israr, Peranan HMI Dalam Aksi-aksi Menentang G30S/PKI di Kota Padang 1965-1968. *Skripsi*. (Padang: FSUA, 1999), hal 46. *Wawancara* dengan Azhar Muhammad. Padang, 24 Juni 2011.

<sup>16</sup> *Singgalang*, Saat Meriam Soekarno Diarahkan ke Kota Padang; 400 mahasiswa beri dukungan kepada PRRI. 4 Februari 2000.

memilih pulang kampung sendiri-sendiri dan bergabung dengan PRRI di daerah masing-masing di Sumatera Barat.<sup>17</sup>

Dikatakan Ali Amsar bahwa keinginan mereka para pelajar dan mahasiswa tersebut pulang kampung dan bergabung dengan PRRI murni atas keinginan sendiri tanpa ada hasutan dari pihak lain, murni panggilan hati nurani untuk membela tanah kelahiran yang akan diobrak-abrik oleh tentara Soekarno. Dukungan yang diberikan oleh para mahasiswa ini tidak ada sangkut pautnya dengan politik.<sup>18</sup> Berbeda dengan keterangan Ali Amsar, Azhar Muhammad yang waktu itu merupakan salah satu mahasiswa baru di Fakultas Ekonomi UI mengatakan bahwa di Jakarta telah berkembang berita tentang keadaan di Sumatera Tengah. Saat perkuliahan salah seorang dosen ekonomi UI menganjurkan kepada mahasiswa yang berasal dari Sumatera Barat untuk segera pulang kampung, untuk membangun dan mengembangkan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang baru saja dirintis. Di balik pernyataan dosen tersebut tersirat makna bahwa apakah mahasiswa yang berasal dari Sumatera Barat tidak ingin ikut berjuang membangun dan membela daerahnya.<sup>19</sup>

Salah satu alasan kuat bagi pemuda pelajar dan mahasiswa mendukung PRRI adalah karena daerahnya akan diporak-porandakan oleh tentara pusat. Niat untuk mempertahankan daerahnya tertuang jelas dalam pituah adat Minangkabau: *Adaik badunsanak, dunsanak patahkan. Adaik bakampuang, kampuang patahkan. Adaik basuku, suku patahkan. Adaik banagari, nagari patahkan*. Karena itulah

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Sofjan Kahar, Padang, 6 Juli 2011.

<sup>18</sup> Singgalang. Op Cit. 4 Februari 2000.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Azhar Muhammad. Padang, 24 Juni 2011.



salah satu alasan kalangan muda terpelajar ini membela daerahnya, karena apa yang mereka pertahankan dan yang mereka yakini adalah benar.<sup>20</sup> Bahkan mereka rela meninggalkan sekolah dan kuliahnya untuk membela tanah kelahirannya dan meninggalkan keluarganya dan bergabung dengan PRRI bergerilya di hutan-hutan belantara Sumatera Barat.

Alasan lain adalah alasan emosional karena melihat tentara pusat menembaki RRI di Bukittinggi sehingga membuat pedagang-pedagang pasar terutama ibu-ibu lari tunggang langgang karena ketakutan. Tentara yang ada di dekat pasar tersebut hanya melihat saja kejadian tersebut dan tidak melakukan apa pun. Sehingga hal itu membuat Saharman Leman sakit hati dan memutuskan untuk bergabung dengan PRRI.<sup>21</sup>

#### **B. Proses Perekrutan dan Pelatihan Militer Bagi Pemuda Pelajar dan Mahasiswa**

Sebelum diproklamasikannya PRRI oleh Ahmad Husein tahun 1958 di Bukittinggi, banyak dari para pemuda pelajar dan mahasiswa yang telah bergabung dengan Dewan Banteng dan ikut mendukung semua tindakan-tindakan yang diambil Dewan Banteng. Pada akhir tahun 1957 banyak dari pemuda pelajar dan mahasiswa yang ada di Sumatera Tengah direkrut dan diberikan pelatihan militer oleh Dewan Banteng. Setelah pemuda pelajar dan mahasiswa mendapatkan pelatihan selama

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Zainal Kahar. Padang, 9 Juli 2011.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Saharman Leman. Padang, 5 Juli 2011.

beberapa bulan mereka kemudian digabungkan dengan pasukan regular yang dimiliki Dewan Banteng yang nantinya bertugas untuk mempertahankan daerah dari serangan APRI yang dikirim dari Jakarta.<sup>22</sup>

Proses perekrutan dari tenaga pelajar dan mahasiswa ini dilakukan untuk menambah jumlah pasukan regular PRRI yang tidak mencukupi. Terdapat dua batalyon pasukan militer KDMST yang dikirim ke luar daerah yakni ke Jawa Barat dan Aceh untuk menumpas pemberontakan di sana, jadi hanya tinggal dua batalyon yang terdapat di Sumatera Tengah waktu itu.<sup>23</sup> Pasukan regular PRRI kebanyakan adalah bekas-bekas pejuang kemerdekaan dahulu, bahkan ketika PRRI diumumkan banyak juga dari bekas tentara pejuang kemerdekaan yang menolak keberadaan PRRI dan memihak pemerintah Pusat. Seperti yang dilakukan oleh mayor Nurmatias, ia membawahi sekitar satu kompi pasukan dan menyatakan keluar dari PRRI dan menyingkir dari Bukittinggi ke daerah Matur dan selanjutnya menuju ke Padang Sago, di bawah kaki Gunung Tandikat Pariaman. Selain Mayor Nurmatias ada lagi komandan kompi Taswar Akip, Kapten Mahyudin Algamar, serta kepala polisi Sumatera Tengah Kaharoeddin Dt. Rangkayo Basa.<sup>24</sup>

Dengan keadaan tersebut Ahmad Husein merasa kecewa, tapi kekecewaannya terobati dengan adanya pasukan sukarela dari para pemuda pelajar dan mahasiswa yang bergabung dengan PRRI dan siap dipersenjatai oleh PRRI. Pasukan tentara sukarela ini direkrut dari pemuda pelajar dan mahasiswa yang ada di Sumatera

---

<sup>22</sup> Mestika Zed dan Hasril Chaniago, *Perlawanan Seorang Pejuang; Biografi Kolonel Ahmad Husein*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), hal 298.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal 295.



Tengah termasuk pelajar dan mahasiswa yang bersekolah di luar daerah terutama yang dari Pulau Jawa dan memutuskan pulang kampung untuk membela kepentingan daerahnya.<sup>25</sup>

Perekrutan pemuda pelajar dan mahasiswa untuk menjadi pasukan PRRI syarat utamanya adalah tidak ada paksaan dari pihak mana pun untuk bergabung dengan PRRI, harus berdasarkan keinginan sendiri. Pendaftaran untuk menjadi pasukan PRRI dilakukan di tiap-tiap nagari oleh simpatisan PRRI atau mendaftar melalui Badan Pertahanan Nagari dan Kota (BPNK) yang ada di tiap-tiap kecamatan, setelah itu dilatih oleh tentara-tentara regular PRRI selama beberapa minggu dan kemudian baru digabungkan dengan pasukan dan kompi masing-masing untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh komandan bataliyon masing-masing daerah.<sup>26</sup>

Pasukan sukarela PRRI yang ada di Bukittinggi kebanyakan berasal dari mahasiswa Fakultas Kedokteran yang jumlahnya cukup banyak dan mereka membentuk pasukan sendiri dengan nama Kompi Mawar dan Kompi Melati.<sup>27</sup> Kompi Mawar dan Kompi Melati ini mendapatkan pelatihan dari tentara regular PRRI di Bukittinggi, komandan Kompi Melati adalah Idris Syah dan wakilnya dari mahasiswa yakni Asnil Sahim dan mereka ditugaskan ke daerah Malalo. Sedangkan Kompi Mawar komandannya adalah Uchin dan wakilnya dari mahasiswa adalah Saidal Bahauddin dan ditugaskan menjaga daerah Kamang.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal 297

<sup>26</sup> Wawancara dengan Umar Daud dan Nasar. Salimpaung, 3 April 2011.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Asnil Sahim. Padang, 13 Juli 2011.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Asnil Sahim. Padang, 13 Juli 2011.

Pasukan sukarela di wilayah Padang ada yang direkrut oleh Adnan Thaib di dekat Tarandam, jumlah anggota yang mendaftar sekitar 60 orang lalu diangkut dengan truk dan di bawa ke tempat pelatihan militer di Lubuk Buaya. Pelatihan di Lubuk Buaya dilakukan selama beberapa minggu dan langsung ditugaskan untuk menjaga wilayah pantai karena pasukan APRI sudah mulai memasuki wilayah perairan Sumatera Barat.<sup>29</sup> Ada juga pasukan yang dilatih di Simpang Haru dan kemudian juga ditugaskan menjaga wilayah pantai.

Materi pelatihan militer yang diberikan kepada pasukan sukarela dari kalangan pemuda pelajar dan mahasiswa adalah materi-materi yang berkaitan dengan disiplin militer seperti baris-berbaris, latihan menggunakan senjata, latihan menembak dan latihan mempertahankan diri dari serangan musuh. Bagi kalangan muda yang tergabung dalam pasukan intel atau lebih dikenal dengan kompi combat diberikan pelatihan khusus seperti bagaimana cara berkomunikasi dengan anggota yang lain agar tidak diketahui oleh musuh. Kompi combat bertugas untuk memberikan informasi kepada pasukan berapa jumlah kekuatan musuh dan persenjataan yang digunakan oleh musuh.<sup>30</sup>

Pasukan sukarela PRRI ini tidak semuanya mendapatkan pelatihan militer, hanya sebagian kecil yang mendapatkan pelatihan militer memadai. Kebanyakan dari pemuda pelajar dan mahasiswa ini mendapatkan pelatihan militer sambil praktek di lapangan dengan mengirim mereka langsung ke daerah operasi yang sesungguhnya.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Syarifuddin Syarif. Padang, 23 Juni 2011.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Syarifuddin Syarif. Padang, 23 Juni 2011.

<sup>31</sup> Mestika Zed dan Hasril Chaniago, *Op Cit.* hal 325.



Jadi tidak heran dengan persiapan pasukan yang tergesa-gesa dan pelatihan yang sebentar dan kurang memadai tidak menjamin daya tempur pasukan PRRI akan hebat, pasukan regular PRRI yang berusia rata-rata diatas 30 tahun dan merupakan warisan perang kemerdekaan belum tentu mau berperang secara total karena memikirkan anak dan istri mereka.<sup>32</sup>



---

<sup>32</sup> Abrar Yusra, *Otobiografi AA. Navis: Satiris dan Suara Kritis dari Daerah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994). hal 94.

## BAB IV

### PERANAN PEMUDA PELAJAR DAN MAHASISWA DALAM PRRI

#### A. Menjadi Pasukan Lapis Dua PRRI

Pertikaian panjang antara pemerintahan pusat dan daerah yang tidak berkesudahan berujung kepada perang saudara. Tidak dipenuhinya tuntutan Dewan Perjuangan oleh pemerintah pusat membuat daerah mengambil keputusan nekad dengan mengumumkan pemerintahan tandingan PRRI. Pemerintah pusat pun tidak segan-segan mengambil kebijakan keras yakni dengan membentuk satuan tempur untuk menumpas PRRI yang dianggap sebagai pemberontak. Maka dikirimlah Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) ke Sumatera Barat dan daerah lain yang memberontak. Pasukan APRI yang diperintahkan untuk menumpas PRRI di Sumatera Barat diberi nama dengan Operasi 17 Agustus di bawah komando Jenderal Ahmad Yani.<sup>1</sup>

Ketika tentara pusat memasuki wilayah Sumatera Barat, langkah pertama yang dilakukan untuk menguasai Sumatera Barat adalah dengan melakukan penyerangan-penyerangan terhadap pemancar radio yang ada di kota Padang dan Bukittinggi. Tujuan dari penyerangan terhadap pemancar-pemancar radio tersebut adalah untuk menghambat jalur komunikasi PRRI.<sup>2</sup> Satu hari sebelumnya yaitu

---

<sup>1</sup> Makmum Salim, *Sejarah Operasi-operasi Gabungan Terhadap PRRI-PERMESTA*. (Jakarta: MABES ABRI. Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, 1998), hal 19.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 31.



tanggal 21 Februari Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) melakukan pemboman sebuah jembatan di Painan.<sup>3</sup>

Operasi 17 Agustus yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani untuk menguasai Sumatera Barat terdiri dari kekuatan yang sangat besar. Terdapat tiga Resimen Team Pertempuran (RTP) yang dibawa ke Sumatera Tengah yakni RTP I (Operasi Tegas) dipimpin oleh Letnan Kolonel Kaharoeddin Nasution dipersiapkan untuk menguasai daerah Riau. RTP I terdiri dari Batalyon 431 Diponegoro dan Yon 528 Brawijaya. Dua RTP lagi dipersiapkan untuk menguasai wilayah Sumatera Barat yakni RTP II di bawah Komandan Letkol Sabirin Mochtar, terdiri dari Yon 509 dan Yon 510 Kodam Brawijaya. RTP III dipimpin oleh Letkol Suwito Harjoko, terdiri dari Yon 438 dan 440 Diponegoro serta Yon 507 Brawijaya.<sup>4</sup> RTP I bertugas untuk mengamankan wilayah Riau. RTP II bertugas di Pariaman, Padang Panjang, Bukittinggi dan Payakumbuh. RTP III ditugaskan mengamankan daerah Solok, Batusangkar, Alahan Panjang dan Muaro Labuah.<sup>5</sup>

Pasukan APRI juga dilengkapi dengan kapal-kapal perang yang terdiri dari kapal KRI Gadjah Mada, KRI Pati Unus, KRI Rajawali, dengan satu batalyon Korp Komando Operasi (KKO) serta 18 kapal pengangkut untuk membawa seluruh pasukan. Angkatan Udara menurunkan 26 pesawat Dakota, 6 mustang, 8 pesawat

---

<sup>3</sup> Hasril Chaniago dan Khairul Jasmi, *Brigadir Jenderal Polisi Kaharoeddin Datuk Rangkeyo Basa, Gubernur di Tengah Pergolakan*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hal 251.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 254.

<sup>5</sup> Halwi Dahlan, dkk. *Dari Dewan Banteng ke PRRI, Kemiripan Sejarah Yang Berulang di Era Reformasi*. (Padang: BKSNT, 2000), hal 55.

Harvard, 6 pesawat B-25, serta Detasemen Pasukan Gerak Tjepat (PGT), dua kompi senapan dan staf detasemen.<sup>6</sup>

Melihat banyaknya pasukan yang dipersiapkan dan dikirim oleh pusat untuk menguasai Sumatera Tengah akan menimbulkan pertempuran yang sangat dahsyat, dan sepertinya pemerintah tidak main-main dengan kekuatan yang dimilikinya untuk menghancurkan kekuatan musuh di Sumatera Tengah. PRRI pun telah menyiapkan pasukannya dengan memberikan pelatihan kepada para pemuda pelajar dan mahasiswa yang ikut bergabung dengan PRRI, mereka dipersenjatai dengan senjata yang diberikan oleh Amerika. Amerika membantu PRRI karena memiliki misi untuk menghambat laju komunis di dunia, namun bantuan Amerika ini cuma bersifat sementara.

Pada tanggal 17 April 1958 pasukan APRRI yang mengawasi daerah pantai Sumatera Barat mulai melakukan pengeboman terhadap kota Padang. Pemboman dilakukan terhadap posisi pasukan PRRI yang menjaga daerah sekitar pantai Padang, terdapat tiga tim yang menjaga pantai Padang tersebut. Tim-tim yang menjaga wilayah sekitar pantai kebanyakan terdiri dari tentara pelajar yang baru dilatih. Tim pertama menjaga dari Bungus sampai daerah Gunung Padang di bawah komando A. Rizal Rahman, tim kedua menjaga dari sekitar Gunung Padang sampai dengan Purus di bawah komando Jabal Lintang, tim ketiga menjaga daerah Purus dan sekitarnya dibawah komando Ali Muhyar.<sup>7</sup> Namun menjelang musuh melakukan pendaratan di

---

<sup>6</sup> Hasril Chaniago dan Khairul Jasmi, *Op Cit.* hal 254.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Syarifuddin Syarif. Padang, 23 Juni 2011.



pantai Padang, keluar perintah dari komandan pasukan bahwa dilarang melepaskan tembakan terhadap posisi musuh. Keadaan ini membuat pasukan yang menjaga daerah pantai kebingungan, dan membiarkan musuh lewat dihadapan mereka tanpa ada perlawanan dari pasukan PRRI.<sup>8</sup>

Pasukan penjagaan PRRI di Kasiék Angek melihat puluhan kapal APRI akan segera merapat di pelabuhan. Pasukan berjaga dari pukul 8 malam sampai jam 6 pagi dengan menggunakan senjata *LA Grand*. Pada pukul 6 kapal-kapal perang pemerintah menurunkan pasukannya dan kota Padang ditembaki dari laut dengan meriam. Komandan mereka waktu itu Mawardi memerintahkan pasukannya segera mundur, lari kearah Simpang Haru lanjut ke Bandar Buat terus ke Indarung lalu ke Cupak, Selayo sampai di Koto Anau.<sup>9</sup>

Pendaratan pasukan pemerintah mulai dilakukan pada pukul 5.30 pagi, tempat pendaratan dipilih di dekat pantai Parupuk dua kilometer dari Tabing, dan sebagian juga mendarat di pantai dekat Ulak Karang. Sebelum mendaratkan pasukannya di pantai Padang, kapal perang dari pemerintah terlebih dahulu melakukan tembakan beruntun kearah pantai dengan target mencapai 4 km ke dalam, terutama ke tempat-tempat penyimpanan senjata berat musuh. Pukul 6 pagi pendaratan mulai bergerak ke dekat pantai sambil mengeluarkan tembakan dan pemboman dengan O-palm ke

---

<sup>8</sup> Mestika Zed dan Hasril Chaniago, *Perlawanan Seorang Pejuang Biografi Kolonel Ahmad Husein*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), hal 323. Wawancara dengan Syarifuddin Syarif. Padang, 23 Juni 2011.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Azhar Muhammad. Padang, 24 Juni 2011.

daerah kota untuk melindungi pasukan Korp Komando Operasi Angkatan Laut (KKO-AL).<sup>10</sup>

Setelah diturunkan pasukan KKO sebagai pasukan pendarat terdepan, maka segera pula diturunkan pasukan RTP III di bawah Letkol Sabirin Mochtar. Pendaratan pasukan pemerintah tidak mendapatkan perlawanan berarti dari pasukan PRRI, karena kebanyakan pasukan PRRI telah terlebih dahulu menyingkir dan mundur ke pinggiran kota sampai ke Ladang Padi dan sebagian ke jalan raya menuju Bukittinggi. Ahmad Husein sendiri pun sudah memindahkan poskonya ke Ladang Padi, sebelah timur kota Padang.<sup>11</sup>

Pendaratan selanjutnya dilakukan di bandara Tabing Padang, pada pendaratan ini diturunkan pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD). Pendaratan RPKAD di bandara Tabing dilakukan di luar area bandara, karena landasan pacu bandara telah dipasang ranjau cakar dari logam runcing yang menghadap ke arah langit. Tujuan pemasangan ranjau-ranjau tersebut untuk menghancurkan dan mencederai pasukan penerjun payung dari tentara pusat. Pendaratan yang dilakukan oleh pasukan pemerintah berjalan dengan lancar, tidak ada perlawanan dari pasukan PRRI.<sup>12</sup>

Begitu juga dengan pelabuhan Teluk Bayur juga telah berhasil dikuasai oleh Batalyon 440/Diponegoro, daerah pelabuhan Teluk Bayur ini juga telah ditanami dengan ranjau-ranjau oleh pasukan PRRI. Di puncak Gunung Padang yang

---

<sup>10</sup> Mestika Zed dan Hasril Chaniago. *Op cit.* hal 310.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 311.

<sup>12</sup> *Ibid*. hal 312.



menghadap ke laut dibangun posko pertahanan PRRI dengan menggunakan senjata meriam bantuan dari Amerika. Pantai Air Manis juga dijaga ketat dengan senjata berat, tidak kurang sekitar 20 pucuk mitriliur 12,4, namun tidak meletus karena telah ditinggalkan oleh pasukan yang berjaga di daerah tersebut.<sup>13</sup> Pada hari itu juga Padang berhasil dikuasai dengan mudah oleh pasukan APRI, pasukan APRI sangat heran karena tidak adanya perlawanan berarti dari pasukan PRRI.

Setelah kota Padang dikuasai oleh pasukan APRI, Ibukota PRRI dipindahkan ke Bukittinggi. Ahmad Yani tidak segera menyerang Bukittinggi setelah berhasil menguasai kota Padang, ia terlebih dahulu membersihkan kota Padang dari unsur-unsur PRRI sambil menyusun strategi untuk menaklukkan kota-kota lain di Sumatera Barat yang dikuasai oleh PRRI.<sup>14</sup> Selanjutnya dalam hal untuk menguasai daerah-daerah lain di Sumatera Barat Ahmad Yani dibantu oleh kepala polisi Sumatera Tengah Kaharoeddin Dt. Rangkayo Basa dan Mayor Nurmatias yang tidak setuju dengan PRRI, dan bergabung dengan APRI setelah APRI masuk ke Sumatera Barat.<sup>15</sup>

Dikuasainya kota Padang oleh APRI, maka pihak PRRI memilih mundur ke daerah pedalaman dan perbukitan di Sumatera Barat dan selanjutnya melakukan perlawanan dengan taktik perang gerilya terhadap pasukan APRI. Ahmad Husein memilih mundur ke daerah Solok, dipilihnya Solok oleh Ahmad Husein sebagai tempat pertahanannya dikarenakan pada masa perang kemerdekaan Solok merupakan markas bagi Resimen III Kuranji yang dikomandoi oleh Ahmad Husein waktu

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hal 312.

<sup>14</sup> *Ibid.* hal 314.

<sup>15</sup> Mestika Zed dan Hasril Chaniago, *Op Cit.* Hal 313.

melawan Belanda, selain itu Kabupaten Solok merupakan daerah penghasil beras sehingga nantinya Solok diharapkan bisa menyuplai bahan makanan pasukannya. Serta wilayah solok memiliki hutan-hutan belantara yang memberikan ruang bagi pasukan untuk bertahan dari kejaran musuh sambil menyiapkan kembali operasi gerilya.<sup>16</sup>

PRRI sebenarnya telah mengantisipasi serangan dari tentara pusat dengan menempatkan pasukan-pasukannya di berbagai daerah. Kota Padang dijaga oleh dua Kompi Pelopor, di daerah Kuranji dan Lubuk Begalung 5 kompi, di Tarusan, Gunung Padang ditempatkan Kompi Bachtiyar dan Bataliyon 142. Dekat Teluk Bayur dan dikaki Gunung Padang ditempatkan Kompi Baterai, untuk menjaga Pantai Air Manis dan kaki Gunung Padang ditempatkan 20 pucuk Mitriliur 12,4. Antara Padang dan Solok ditempatkan pasukan-pasukan PRRI di beberapa posko yaitu di Cengkeh juga merupakan tempat penyimpanan senjata ditempatkan 9 panzer, di Indarung 1 regu, di Ladang Padi yang juga merupakan tempat pelatihan dan Komando Pertahanan Pertempuran untuk daerah Padang ditempatkan 3 Pucuk Mitriliur 12,4. Daerah Solok merupakan pusat komando Ahmad Husein ditempatkan 1 kompi dan 2 detasemen pasukan serta dilengkapi dengan radio telefoni sebagai alat komunikasi. Di Alahan Panjang terdapat 1 kompi, Muaro Labuh 1 kompi, Batusangkar 5 kompi, Sungai Dareh 5 kompi dan di Payakumbuh 1 kompi.<sup>17</sup> Diantara komandan-komandan kompi tersebut seperti Idris Majdi, A. Rizal Rahman dan Jabal Lintang.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal 317.

<sup>17</sup> Makmun Salim, *Op Cit.* hal 33.



Dalam melakukan penaklukan terhadap daerah-daerah yang dikuasai PRRI, APRI mendapatkan perlawanan dari pasukan-pasukan PRRI yang kebanyakan terdiri dari pemuda pelajar dan mahasiswa yang bergabung dengan PRRI dan mendapatkan pelatihan secara militer. Pemuda pelajar dan mahasiswa ini lah sebenarnya nyawa dari keberlangsungan PRRI selama 3,5 tahun perang gerilya berlangsung di Sumatera Barat sampai dipanggilnya kembali pasukan yang memberontak kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.<sup>18</sup>

Ketika diumumkannya PRRI banyak dari pemuda pelajar dan mahasiswa ini menyatakan kesiapan mereka dipersenjatai oleh PRRI melawan pemerintah yang dianggap tidak demokratis, terlalu sentralistik, tidak memperhatikan aspirasi daerah dan terlalu condong kepada komunis. Dalam perkembangan selanjutnya, maka diberikan latihan militer kepada pemuda pelajar dan mahasiswa oleh tentara regular PRRI. Setelah pelatihan militer selesai generasi muda ini digabungkan ke dalam pasukan-pasukan PRRI dan siap diterjunkan ke lapangan untuk mengantisipasi serangan-serangan dari pemerintah pusat.<sup>19</sup>

Pemuda pelajar dan mahasiswa ini digabungkan dalam tiap-tiap kompi yang ada di daerah mereka masing-masing. Namun dalam perjalanan perang gerilya selanjutnya pergerakan mereka dilakukan secara *mobile*, dikirim ke daerah-daerah yang memerlukan bantuan mereka atau mereka bergerak karena musuh telah menguasai daerah yang mereka jaga. Pemuda pelajar dan mahasiswa yang tergabung

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Zainal Kahar. Padang, 9 Juli 2011.

<sup>19</sup> Mestika Zed dan Hasril Chaniago, *Op Cit.* hal 238.

dalam PRRI ini tidak semua menjadi tentara, ada dari mereka yang memiliki tugas-tugas lain seperti sebagai staf keuangan seperti Azhar Muhammad dan Umar di Bataliyon Harimau Minang di Tanah Datar, sebagai sekretaris pribadi dari pimpinan PRRI seperti Asnil Sahim yang merupakan sekretaris dari Ahmad Husein dan lain sebagainya.

Pasukan sukarela dari pemuda pelajar dan mahasiswa ini tergabung dalam berbagai batalyon di daerah masing-masing. Padang terkenal dengan Batalyon Basoka, Batalyon Kuranji, Batalyon Gunung Nago. Batalyon yang ada di Pariaman adalah Batalyon 5 Oktober. Batalyon di Sijunjung ada Batalyon Kapujan, dan Bataliyon Kopitan. Daerah Agam terdapat Batalyon 24 dan Bataliyon di bawah perintah Dahlan Djambek, Bataliyon Beruang Agam, Bataliyon Imam Bonjol. Di Batusangkar ada Bataliyon Harimau Minang. Masing-masing bataliyon membawahi beberapa kompi.<sup>20</sup>

Kompi-kompi yang terkenal adalah kompi melati dan kompi mawar yang kebanyakan pasukannya berasal dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Mereka bergabung dan menerima pelatihan militer di Bukittinggi, ketika APRI masuk ke Sumatera Barat wilayah operasi kedua kompi ini pun dibagi. Kompi Melati dengan komandannya Idris Syah dan wakil kompi dari mahasiswa kedokteran adalah Asnil Sahim, kompi melati ditugaskan ke daerah Malalo dekat Singkarak. Kompi Mawar di bawah komando Uchin dengan wakilnya dari mahasiswa kedokteran yakni Saidal Bahauddin, Kompi Mawar ditugaskan menjaga daerah

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Syuib MS. Padang, 5 Mei 2011.



Kamang dan Canduang. Daerah operasi kedua tim tergantung kepada daerah asal komandan mereka.<sup>21</sup>

Mahasiswa-mahasiswa Fakultas Kedokteran Unand jumlahnya cukup banyak, kebanyakan dari mereka memilih bergabung dalam korps mahasiswa bersenjata yang terdiri dari Kompi Mawar dan Kompi Melati. Selain itu mahasiswa kedokteran ini juga ada yang bertugas di bagian Palang Merah, dan bergabung dengan tim medis dari Rumah Sakit Umum di Bukittinggi, mereka tidak ikut bergerilya di hutan, tetapi tinggal di dalam kota Bukittinggi. Bagian lain adalah bagian penerangan dan bergabung dengan pemerintahan sipil.<sup>22</sup>

Ketika APRI masuk, banyak kesatuan pasukan PRRI yang tercerai-berai dari induk pasukannya, bahkan ada yang membelot dan bergabung dengan pasukan APRI. Melihat situasi seperti itu, pimpinan PRRI langsung mengadakan konsolidasi pasukan dengan membentuk pusat latihan calon perwira (capa) di Tabek Panjang, Lintau dan beberapa tempat lainnya. Pasukan yang dilatih di Tabek Panjang ini lah yang menjadi sumber tenaga baru bagi kekuatan PRRI, karena disinilah dicetak para calon perwira yang akan dikirim memimpin operasi PRRI di berbagai front, termasuk sebagai penyangga markas Ahmad Husein yakni yang dikenal dengan COP (Comando Operasi Pertempuran) yang sering berpindah-pindah di daerah Solok serta markas Dahlan Djambek yang *mobile* di daerah Agam.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Asnil Sahim. Padang, 13 Juli 2011.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Asnil Sahim. Padang, 13 Juli 2011.

<sup>23</sup> Mestika Zed dan Hasril Chaniago, *Op Cit.* hal 325.

Angkatan pertama capa yang dilatih di Tabek Panjang berjumlah 43 orang, mereka dipanggil untuk mengikuti Pendidikan Komandan Pleton I ( PKP I). ke 43 orang yang mengikuti pendidikan komandan pleton adalah; Anasrul AR, Anas Latif, Achyar Darussalam, Aziz Datuk, Amir Kaum, Achmad Hamid, Arifin, Ali Amsar, Anas Ya'kub, Bahar K, Chaidir Dalimi, Damanhuri, Yonahar, Yanuar, Yan Alwi, Hasan Aceh, Hasan Basri, Mus Intan, Musri Rasid, Masri, Mawardi, Maizar, Muchtar Abidin, Nazif, Rizal Mansyuk, Syafri Yakob, Syafri Syafei, Syafri Rasyid, Syabri Wahab, Syaiful Kahar, Syahrial Syam, Syaiful Bahri, Sulini, Syarifuddin Syarif, Syuib Ms, Thaib, Tamsil, Ismet, Joni, Yubahar, Bagindo Fahmi, Fajar dan Zamach Sari.<sup>24</sup>

Angkatan kedua jumlah pesertanya lebih besar, yakni sekitar 150 orang, kebanyakan angkatan kedua ini terdiri dari mahasiswa kedokteran Universitas Andalas. Dalam pelatihan ini, mereka dibagi dalam tiga bagian yakni bagian pasukan infanteri, bagian territorial dan bagian pasukan intelijen. Angkatan ketiga terkenal dengan pasukan capa Kawai karena dilatih di Kawai, Lintau. Peserta pelatihan capa Kawai ini juga dipersiapkan untuk menjadi komandan pleton. Pelatihan dilakukan selama tiga bulan lalu para siswa capa dikirim ke medan pertempuran untuk melakukan praktek lapangan selama tiga bulan juga. Materi pelatihan diantaranya mengetahui taktik-taktik perang, memperkenalkan bermacam-macam senjata, taktik kesatuan kecil seperti bagaimana cara menyerang, cara bertahan dan posisi-posisi strategis dalam menghadapi musuh. Daerah tempat-tempat praktek lapangan seperti

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Syarifuddin Syarif. Padang, 23 Juni 2011.



dikirim ke Tanjung Barulak, ke Sawah Lunto, dan ke Payakumbuh. Setelah praktek selama beberapa lama kembali ditarik ke Lintau setelah itu baru ditugaskan ke beberapa posisi.<sup>25</sup>

Bagian infanteri dipersiapkan untuk menjadi pasukan-pasukan militer dan menjaga setiap wilayah yang masih dikuasai PRRI serta menghadang kedatangan pasukan APRI di wilayah yang masih dikuasai PRRI. Bagian territorial bergabung dengan pemerintahan sipil dengan tugas-tugas untuk membantu perlengkapan dan segala hal yang berhubungan dengan keperluan dalam pemerintahan dan pasukan. Bagian intelijen bertugas sebagai mata-mata untuk melihat pergerakan dan kekuatan musuh.

Setelah pelatihan di Lintau maka pasukan yang dilatih dikembalikan ke induk pasukan masing-masing dan ada yang ditarik dan direkrut untuk menjadi pasukan pengamanan pimpinan PRRI dan menjadi staf dalam jajaran pimpinan PRRI. Seperti Saharman Leman dan Asnil Sahim keduanya merupakan mahasiswa kedokteran Universitas Andalas, setelah menjalani pelatihan di Lintau kedua mahasiswa tersebut ditugaskan dan bergabung dengan pimpinan PRRI yakni Ahmad Husein. Saharman Leman ditugaskan sebagai pasukan pengamanan Ahmad Husein dan keluarga Ahmad Husein, sementara Asnil Sahim ditunjuk sebagai sekretaris pribadi Ahmad Husein.

Saharman Leman dan pasukannya bertugas atas keselamatan dan kerahasiaan tempat persembunyian Ahmad Husein dan keluarganya, tempat persembunyian atau markas Ahmad Husein dikenal dengan COP (Comando Operasi Pertempuran) yang

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Saharman Leman. Padang, 5 Juli 2011.

selalu berpindah-pindah di daerah Solok. Setiap tamu yang ingin berkunjung dan bertemu dengan Ahmad Husein harus melalui pemeriksaan dan pengawasan yang sangat ketat dari pasukan Saharman Leman. Tamu yang ingin menemui Ahmad Husein harus menjalani pemeriksaan di beberapa pos pengamanan sebelum diizinkan bertemu dengan Ahmad Husein. Sebelum bertemu dengan Ahmad Husein tamu tersebut di bawa pada jalan yang berputar-putar untuk menghilangkan jejak agar tidak diketahui musuh dan melewati beberapa pos pengawalan yang tersembunyi dan dilengkapi dengan senapan mesin dan sejenisnya..<sup>26</sup>

Dalam melakukan pengamanan terhadap Ahmad Husein dan keluarganya di dalam markas COP yang hanya mengetahui posisi markas hanyalah Saharman Leman dan komandan-komandan regu yang tergabung dalam pasukan pengamanan Ahmad Husein dan keluarga. Sementara anak buah dari Saharman Leman tidak mengetahui posisi markas Ahmad Husein. Tugas pengamanan terhadap pimpinan PRRI Ahmad Husein dan keluarganya dilakukan oleh dua pleton pasukan yakni sekitar 40 orang. Tugas lain yang dijalankan oleh pasukan pengamanan Ahmad Husein adalah jika posisi markas komando Ahmad Husein hampir diketahui oleh musuh maka segera pasukan pengamanan ini mengevakuasi Ahmad Husein dan keluarga ke daerah yang lebih jauh ke pedalaman hutan belantara di daerah Solok. Serta mendirikan pemukiman baru untuk keluarga Ahmad Husein, biasanya untuk membuat

---

<sup>26</sup> Soewardi Idris, *Perjalanan Dalam Kelam, Senarai Kisah Pemberontakan PRRI*. (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2008), hal 37.



pemukiman baru bagi keluarga Ahmad Husein dan markas komando PRRI dekat dengan aliran sungai.<sup>27</sup>

Selama Saharman Leman dan anak buahnya menjadi pengawal Ahmad Husein, mereka telah melakukan tiga kali evakuasi terhadap keluarga Ahmad Husein serta pemindahan pos komando PRRI. Pencarian lokasi baru untuk pos komando dan mengevakuasi keluarga Ahmad Husein dibantu oleh warga setempat yang pro-PRRI dan mengetahui kondisi hutan di dekat tempat yang akan ditinggali oleh Ahmad Husein dan rombongannya.<sup>28</sup> Lokasi yang dipilih sebagai tempat pemukiman bagi keluarga Ahmad Husein dan rombongan pengungsi yang berjumlah sekitar seratus orang adalah daerah yang terlindung dan ditutupi oleh pohon-pohon yang lebat, sehingga tidak mudah ditemukan oleh musuh.<sup>29</sup>

Saharman Leman juga ditugaskan untuk membentuk pasukan baru disamping tugas sebagai pengawal Ahmad Husein di Alahan Panjang karena sudah terdesak oleh pasukan APRI. Dibentuk kelompok-kelompok kecil dengan nama *Jungle Fighter*, anggota pasukan *jungle fighter* ini dipilih dari pengawal-pengawal yang ada dan dalam operasinya menggunakan taktik *kick and Run*, yaitu mencegat musuh dan kita menghilang dari situ.<sup>30</sup>

Sebelum bergabung dengan Ahmad Husein, Saharman Leman merupakan komandan kompi dalam pasukannya dan ditugaskan secara *mobile* di daerah Gunung

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Saharman Leman. Padang, 5 Juli 2011.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Saharman Leman. Padang, 5 Juli 2011.

<sup>29</sup> Mestika Zed dan Hasril Chaniago, *Op cit.* hal 361.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Saharman Leman. Padang, 5 Juli 2011.

Marapi, Balingka dan Maninjau dan setelah itu dipanggil untuk mengikuti pendidikan capa di Tabek Panjang. Dalam melaksanakan tugas ia membagi pasukannya dalam 4 seksi, seksi satu bertugas melakukan pengintaian terhadap musuh, seksi dua bertugas sebagai perencana operasional, seksi tiga bertugas menyiapkan logistik atau perbekalan untuk pasukan, dan seksi empat penguasaan territorial yakni yang berhubungan dengan masyarakat tujuannya untuk mencari dukungan rakyat dan perbekalan bagi pasukan.<sup>31</sup>

Sementara itu Asnil Sahim ditugaskan menjadi sekretaris pribadi Ahmad Husein, tugas pertama yang diemban oleh Asnil Sahim adalah membawa uang yang akan ditandatangani oleh Ahmad Husein.<sup>32</sup> Setelah pemerintah pusat mengambil kebijakan dengan menarik uang dari peredaran dan menggantinya dengan uang yang baru. Kebijaksanaan tersebut membuat PRRI kerepotan, karena mereka telah menyiapkan uang yang cukup banyak yang diambil dari bank-bank pemerintahan di Sumatera Tengah. Menukarkan uang ke kota tentu sangat sulit karena bisa disita oleh APRI, untuk itu Ahmad Husein mengambil kebijaksanaan dengan mencap uang-uang tersebut dengan stempel Dewan Banteng dan menandatangani sendiri. Setelah dicap dan ditandatangani baru bisa uang tersebut diedarkan lagi.<sup>33</sup> PRRI juga pernah

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Saharman Leman. Padang, 5 Juli 2011.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Asnil Sahim, Padang, 22 Juni 2011.

<sup>33</sup> Soeardi Idris, *Op Cit.* hal 50.



mencetak uang putih dan uang tersebut hanya berlaku untuk wilayah Sumatera Tengah saja.<sup>34</sup>

Tugas-tugas yang dikerjakan oleh Asnil Sahim selaku sekretaris pribadi Ahmad Husein cukup banyak. Ia mengikuti kemana Ahmad Husein pergi memantau keadaan-keadaan di daerah lain, serta menghadiri rapat-rapat yang diikuti oleh Ahmad Husein dan mencatat hasil-hasil rapat yang dilangsungkan. Asnil Sahim juga menjadi perantara bagi orang-orang yang ingin bertemu dengan Ahmad Husein. Ia juga mengurus masalah makanan atau logistik untuk kebutuhan Ahmad Husein dan rombongan. Menerjemahkan isi surat yang akan dikirim atau surat yang diterima dari pimpinan PRRI yang lain, karena surat-surat tersebut menggunakan kata sandi supaya isi surat tidak diketahui oleh musuh.<sup>35</sup>

Sedangkan Saidal Bahauddin menjadi staf dari Kolonel Zulkifli Lubis yang merupakan kepala bagian intelijen PRRI. Saidal dan rekannya Nurjaman muchtar banyak mendapatkan pelajaran dan pengetahuan intelijen dari Zulkifli Lubis seperti mempelajari taktik dan strategi pertempuran. Bergabungnya Saidal Bahauddin dengan bagian intelijen PRRI memberi kesempatan bagi Saidal untuk cepat memahami situasi serta tanggap dengan segala persoalan yang sedetil-detilnya, mampu mengambil keputusan dan tindakan dengan cepat dan penuh perhitungan.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Umar Daud, ketika PRRI ia merupakan staf keuangan di Bataliyon Harimau Minang. Salimpaung, 3 April 2011. Wawancara dengan Azhar Muhammd ia juga merupakan salah satu staf keuangan dan perbekalan di COP Ahmad Husein. Padang, 24 Juni 2011.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Asnil Sahim. Padang, 13 Juli 2011.

<sup>36</sup> Fajar Rusvan dan Irham, *Bang Saidal Konsistensi Anak Zaman*. (Jakarta: JC Institute, 2007), hal 61.

Siswa didikan capa Tabek Panjang dan Kawai di Lintau sebenarnya diplot untuk menjadi komandan-komandan pleton, mereka dikirim ke beberapa daerah untuk menjalani operasi-operasi gerilya melawan tentara pusat. Seperti Zainal Kahar dikirim ke Surantiah untuk memimpin satu pasukan dan menghambat kedatangan pasukan APRI supaya tidak masuk ke Surantiah karena saat itu pasukan APRI sudah berada di Painan, di Surantiah Zainal Kahar juga diminta menjadi instruktur untuk melatih pemuda-pemuda kampung di Surantiah yang ingin bergabung dengan PRRI.<sup>37</sup>

Pelatihan militer juga diadakan untuk komandan-komandan regu di beberapa daerah seperti di Sungai Garinggiang Pariaman dan di Solok, yang dilatih adalah komandan-komandan regu yang mewakili bataliyon-bataliyonnya. Tiap-tiap komandan regu dilatih taktik-taktik militer dan nantinya bisa diajarkan kepada pasukannya masing-masing.<sup>38</sup> Di Solok yang mendapatkan pelatihan-pelatihan militer ini terdiri dari pelajar-pelajar tingkat sekolah lanjutan pertama dan lanjutan atas, mereka digabungkan dalam Kompi Kuranji Yuniior. Tugas Kompi Kuranji Yuniior ini salah satunya adalah melakukan misi pengintaian terhadap keberadaan musuh.<sup>39</sup>

Selain pelatihan untuk capa di Tabek Panjang Lintau, juga terdapat pelatihan militer lain yang diadakan di Lubuk Sikaping yakni dinamakan dengan Sekolah Pendidikan Inspektur (SPI). Pelatihnya adalah Korp Komando Operasi (KKO) Ali Sjaruddin, dan jumlah pesertanya sekitar 60 orang, setelah selesai pendidikan maka

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Zainal Kahar. Padang, 9 Juli 2011.

<sup>38</sup> Wawancara dengan Syuib MS. Padang, 5 Mei 2011.

<sup>39</sup> Ahmad Kusasi, *Aktivitas PRRI di Kabupaten Solok 1958-1961. Skripsi*, (Padang: FSUA, 2008). Hal 53.



mereka pun ditebar ke berbagai daerah, bahkan dikirim ke daerah operasi di Tapanuli dibawah komando Boyke Nainggolan.<sup>40</sup>

Bahkan ada tim khusus yang dikirim pelatihan ke Okinawa di Jepang yakni antara lain Sofyan Kahar, Syamsir Saad dan Arifin. Mereka berangkat dengan pesawat Katalina kepunyaan Amerika Serikat, berangkat dari Singkarak terus ke Brunei dan juga melewati Filipina, dari Filipina baru ke Jepang. Selama di Jepang pelatihan militer diberikan oleh orang CIA Amerika, materi pelatihan yang diberikan adalah berupa cara-cara menggunakan berbagai macam senjata serta mempelajari alat komunikasi agar bisa terhubung antara satu daerah dengan daerah lain. setelah pelatihan selesai mereka kembali pulang melewati Malaysia dan terus ke Aceh, dari Aceh berjalan kaki pulang ke Sumatera Barat selama 6 bulan. Dari Jepang Sofyan Kahar dan teman-temannya membawa satu set radio jenis Markoni, yang berguna sebagai alat komunikasi bagi PRRI ketempat lain termasuk ke Permesta di Sulawesi.<sup>41</sup>

Selama perang gerilya berlangsung antara pemerintah pusat dan PRRI, masalah kebutuhan makanan tidak terlalu menjadi persoalan bagi pasukan PRRI. Kebutuhan makanan bagi pasukan PRRI dibantu oleh masyarakat yang simpati kepada perjuangan PRRI, seperti nasi bungkus diberikan oleh masyarakat kepada para anggota PRRI.<sup>42</sup> Bahkan pernah salah satu masyarakat Tabek Panjang memberikan 5 ekor kerbaunya kepada PRRI untuk dijual dan dibelikan beras untuk

---

<sup>40</sup> Mestika Zed dan Hasril Chaniago, *Op Cit.* hal 326. Dan Wawancara dengan Syarifuddin Syarif. Padang, 23 Juni 2011.

<sup>41</sup> Wawancara dengan Sofyan Kahar. Padang, 6 Juli 2011.

<sup>42</sup> Wawancara dengan Asnil Sahim. Padang, 13 Juli 2011. Dan syuib Ms, Padang 5 Mei 2011.

makan pasukan PRRI dengan perjanjian kalau PRRI menang akan diberi gantinya, tapi kalau tidak menang tidak akan diganti.<sup>43</sup> Masalah pakaian pasukan PRRI rata-rata memiliki dua pasang pakaian yang dibagikan oleh bagian perlengkapan PRRI, ketika mandi di sungai mereka akan berlama-lama berendam di air, sambil menunggu pakaian mereka yang dijemurkan di batu-batu dekat sungai kering.<sup>44</sup>

Seperti itulah keadaan pasukan PRRI selama mereka bergerilya di hutan-hutan Sumatera Barat, itulah resiko yang harus dihadapi karena memilih berhadapan dengan penguasa. Hal itu berlangsung selama kurang lebih 3,5 tahun sampai akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan memberi amnesti dan abolisi kepada pihak yang menentang pemerintah.

## **B. AKHIR DARI PERANG SAUDARA**

Setelah mengalami perjalanan panjang hampir selama 3,5 tahun perang gerilya di hutan-hutan Sumatera Barat, dan belum terlihat akhir dari konflik antara pusat dan daerah. Maka dengan mengeluarkan seruan kepada para pemberontak untuk kembali ke pangkuan ibu pertiwi, Presiden Soekarno mengumumkan pemberian amnesti dan abolisi kepada seluruh pemberontak di Indonesia termasuk PRRI, dengan mengeluarkan keputusan Presiden (keppres) no 332 tahun 1961. Keluarnya keputusan

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Umar Daud. Salimpaung, 3 April 2011.

<sup>44</sup> Wawancara dengan Asnil Sahim. Padang, 13 Juli 2011.



presiden tersebut membuat pihak PRRI mempertimbangkan tawaran pemerintah tersebut.<sup>45</sup>

Melihat situasi yang terjadi di lapangan di mana hanya sedikit wilayah yang masih dikuasai oleh PRRI, dan perlawanan yang diperlihatkan oleh pasukan PRRI hanya bersifat penghadangan dan sabotase saja. Pertimbangan untuk mengakhiri konflik dengan pemerintah pusat disebabkan karena diantaranya Ahmad Husein mempertimbangkan korban yang makin banyak berjatuh di pihak rakyat sipil, baik yang mati dibunuh maupun disiksa oleh pihak pasukan APRI dan oleh Organisasi Pertahanan Rakyat (OPR) merupakan pasukan yang berada di bawah kendali PKI.<sup>46</sup> Pertimbangan lain dari Ahmad Husein untuk memilih berdamai dengan penguasa adalah memikirkan nasib dan masa depan generasi muda yakni pelajar dan mahasiswa yang setia mendukung PRRI dan perjuangannya.<sup>47</sup>

Setelah berunding dengan pemimpin PRRI yang lain dan pihak Permesta di Sulawesi, maka Ahmad Husein dan pimpinan yang lainnya dengan berturut-turut pun keluar dari persembunyiannya dan menyatakan kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Sebelum Ahmad Husein turun dan menampakkan diri, pasukan pengawalnya terlebih dahulu menyisir daerah yang akan dilalui oleh Ahmad Husein untuk menjaga keselamatan Ahmad Husein nantinya.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> M. Halwi Dahlan dkk, *Dari Dewan Banteng ke PRRI, Kemiripan Sejarah Yang Berulang di Era Reformasi*. (Padang: BKSNT, 2000), hal 58.

<sup>46</sup> *Wawancara* dengan Zainal Kahar. Padang, 9 Juli 2011.

<sup>47</sup> Mestika Zed dan Hasril Chaniago, *OP Cit*. hal 364.

<sup>48</sup> *Wawancara* dengan Saharman Leman. Padang, 5 Juli 2011.

Ahmad Husein keluar dari persembunyiannya pada tanggal 23 Juni 1961, dan disambut oleh Deputy KSAD untuk wilayah Sumatera Mayjen Suprpto di Lapangan Merdeka Solok. Setelah menyerah Ahmad Husein juga memberi perintah kepada semua anak buahnya supaya meletakkan senjata dan ia sendiri yang akan menumpas apabila tidak mematuhi perintah tersebut.<sup>49</sup>

Sementara pimpinan PRRI yang lain seperti Sjafruddin Prawiranegara, Zulkifli Lubis dan Burhanuddin Harahap kembali secara berturut-turut pada akhir Agustus di dekat Padang Sidempuan. Sedangkan Mohammad Natsir baru menyerahkan diri pada tanggal 25 September 1961 di Palembang, Agam. Nasib tragis dialami oleh Dahlan Djambek, sebelum ia menyerahkan diri ia terlebih dahulu mengirim surat kepada Panglima Kodam III Kolonel Soerjosoempeno. Dalam suratnya tersebut Dahlan Djambek menyatakan keengganannya menyerah dan menyatakan sumpah setia kepada UUD 1945, karena ia beranggapan syirik bersumpah setia selain kepada Tuhan. Ia menyatakan kesiapannya ditangkap dan diadili di Mahkamah Pengadilan, dan ia menunjukkan tempat dimana ia akan menyerahkan diri yakni di Padang Laring, Bonjol. Lokasi penyerahan dirinya tersebut diketahui oleh OPR yang merupakan pasukan bentukan PKI, PKI sendiri sangat memusuhi Dahlan Djambek karena ia merupakan pencetus dibentuknya Gerakan Bersama Anti Komunis (GeBAK). Gubuk tempat tinggalnya pun dikepung oleh

---

<sup>49</sup> Gusti Asnan, *Memikir Ulang Regionalisme Sumatera Barat Tahun 1950-an*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hal 204.



OPR, pada waktu subuh ketika ia hendak mengambil wudhu', ia pun ditembak oleh pasukan OPR, ketika itu juga Dahlan Djambek menemui ajalnya.<sup>50</sup>

Penyerahan diri oleh pasukan PRRI terjadi di berbagai tempat di wilayah Sumatera seperti di Solok, di Sijunjung, di Kota Padang dan di wilayah Tapanuli. Perlakuan yang diterima pun berbeda-beda, seperti di daerah Tapanuli dan di Sijunjung mereka yang menyerahkan diri diberi uang untuk kembali ke kampung masing-masing dan oleh tentara yang menerima mereka mengatakan bahwa anggap saja diri mereka baru pulang dari Rantau.<sup>51</sup>

Seluruh pemberontak yang menyerahkan diri baik dari kalangan militer atau sipil harus menjalani screening, yaitu acara pemeriksaan untuk mendapatkan Surat Keterangan Penyerahan Diri (SKPD).<sup>52</sup> Bagi tentara yang terlibat dengan PRRI diizinkan kembali untuk berdinass diketentaraan dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan fisik, siapa yang sehat bisa kembali berdinass dan pangkatnya diturunkan, namun yang tidak lulus tes kesehatan diberi hak pensiun.<sup>53</sup> Sedangkan bagi pegawai negeri yang terlibat dengan PRRI diberlakukan hal yang sama boleh kembali bekerja dengan syarat diantaranya harus memiliki surat keterangan T3 (Ternyata Tidak Terlibat), kalau memiliki surat tersebut maka bisa kembali berdinass

---

<sup>50</sup> Mestika Zed dan Hasril Chaniago, *Op Cit.* hal 367.

<sup>51</sup> Wawancara dengan Umar Daud. Salimpaung, 3 April 2011. Lihat juga Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan ke Integrasi, Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hal 358.

<sup>52</sup> Ahmad Kusasi, *OP Cit.* hal 78.

<sup>53</sup> Wawancara dengan Umar Daud. Salimpaung, 3 April 2011.

dengan masa dinas nol. Banyak juga yang akhirnya membuat surat keterangan tidak terlibat tersebut dan bisa kembali ke pekerjaan mereka sebagai pegawai.<sup>54</sup>

Perlakuan yang diterima oleh orang-orang PRRI baik dari kalangan pimpinan PRRI yang militer dan non militer sama yakni ditahan di penjara-penjara atau ditempatkan ditahanan rumah, awalnya di Sumatera lalu dipindahkan ke Jawa. Sedangkan pengikut-pengikut mereka yang tinggal di Sumatera Barat mengalami diskriminasi dan karantina politik serta penghinaan baik dari kalangan PKI maupun dari masyarakat yang tidak setuju dengan keberadaan PRRI.<sup>55</sup> Dalam kehidupan sehari-hari orang-orang yang terlibat PRRI dipersulit dalam hal mencari pekerjaan dan mengurus keperluan mereka seperti mengurus KTP dan mengurus hak pensiun bagi pegawai yang ingin pensiun dini.<sup>56</sup>

Keadaan lebih baik diterima oleh kalangan pelajar dan mahasiswa mereka diizinkan kembali untuk mengikuti pendidikan mereka. Hampir semua mahasiswa kedokteran Universitas Andalas kembali ke bangkuperkuliahannya mereka yang telah berpindah tempat dari Bukittinggi ke Padang. Namun tidak sedikit juga dari para pelajar dan mahasiswa ini yang mengalami depresi akibat kalah perang, seperti yang dialami oleh Saharman Leman setelah kembali dari hutan, ia tidak langsung mengikuti perkuliahan tapi lari ke Jakarta dan di Jakarta dia bekerja sebagai calo tiket kereta Api di Stasiun Senen dengan beberapa orang teman. Hal ini diketahui oleh kakak sepupunya yang bekerja di Kodam Jaya di Jakarta, ia dinasehati oleh

---

<sup>54</sup> H. C. Israr *Kesederhanaan dan Kepejuangan Anak Payakumbuh*. Ed, M. Hikmat Israr. (Bandung: Budaya Media, 2004), hal 138.

<sup>55</sup> Audrey Kahin, *OP Cit.* hal 359.

<sup>56</sup> Wawancara dengan Nasar dan Umar Daud. Salimpaung, 3 April 2011.



sepupunya tersebut dan disuruh kembali ke Padang dan melanjutkan kuliahnya yang sempat ia tinggalkan, maka ia pun kembali ke bangku kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.<sup>57</sup>

Lain lagi cerita yang dialami oleh Azhar Muhammad, ia tertangkap ketika hendak shalat subuh setelah malamnya ia dan rekannya menyebarkan pamflet di daerah Kayu Tanam. Dia digeledah oleh Pasukan Gerak Tjepat (PGT), dan dibawa ke Tabining ditahan selama satu bulan, hampir selama satu bulan tersebut ia diinterogasi tiap malam atas keterlibatannya dengan PRRI dan ia menjawab bahwa ia hanya ingin membela daerah. Setelah dilepaskan selama tiga bulan ia meratapi nasib, dan ia memilih untuk tidak melanjutkan kuliahnya tetapi memilih untuk membuka usaha.<sup>58</sup> Awalnya ia membuka lapak buku bekas di dekat masjid Taqwa di Pasar Raya Padang, di sana ia dan teman-temannya sesama orang-orang yang pernah terlibat dengan PRRI berkumpul membicarakan masa depan mereka.<sup>59</sup>

Pelajar dan mahasiswa yang melanjutkan sekolah mereka banyak yang mengalami kendala dalam segi biaya dan mengejar ketertinggalan mereka dalam pelajaran. Mahasiswa yang kembali ke bangku perkuliahan juga mendapatkan pengawasan dalam hal keorganisasian di mana mereka dilarang terlibat secara

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Saharman Leman. Padang, 5 juli 2011.

<sup>58</sup> Wawancara dengan Azhar Muhammad. Padang, 24 Juni 2011.

<sup>59</sup> Fajar Rusvan dan Irham, *Op Cit.* hal' 64.

struktural dalam organisasi-organisasi kampus karena mereka pernah terlibat dengan PRRI.<sup>60</sup>

Berakhirnya PRRI meninggalkan trauma yang mendalam bagi rakyat Sumatera Barat baik yang terlibat langsung maupun yang tidak. Kekalahan yang diderita oleh PRRI setelah operasi militer tentara pusat berhasil meluluhlantakkan kehidupan sosial politik, ekonomi dan budaya daerah.<sup>61</sup> Dampak kekalahan PRRI tidak hanya dirasakan oleh orang-orang yang terlibat secara langsung dengan PRRI, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat luas di Sumatera Barat. Mereka mengalami tekanan dengan kehadiran tentara pusat di wilayah mereka, mereka harus memalingkan muka ketika berpapasan dengan tentara dan harus turun dari sepedanya ketika melewati pos penjagaan tentara, kalau tidak melakukan hal seperti itu bisa dipanggil dan mendapat tamparan.<sup>62</sup> Tidak hanya itu teror dan intimidasi terhadap orang-orang yang terlibat PRRI juga dilakukan oleh kaki tangan PKI, penghinaan juga dilakukan dengan memberi tanda silang yang berarti tanda sebagai pemberontak di setiap rumah-rumah penduduk yang anggota keluarganya terbukti terlibat dengan PRRI.<sup>63</sup>

Bagi masyarakat yang tidak tahan terhadap perlakuan yang diterima di kampung halaman sendiri memilih pergi merantau, kekalahan PRRI memiliki dampak yang sangat besar bagi jumlah perantauan orang Minang ke luar daerahnya

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Zainal Kahar. Padang, 9 juli 2011. Lihat juga Fajar Rusvan dan Irham, *Ibid.* hal 66.

<sup>61</sup> Mestika Zed Dkk, *Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1995*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hal 157.

<sup>62</sup> *Ibid.* hal 163.

<sup>63</sup> Syamdani, *PRRI Pemberontakan atau Bukan?*. (Yogyakarta: Medpress, 2009), hal 92.



seperti ke Jakarta, Medan, Palembang dan Pekanbaru serta daerah-daerah lainnya di Indonesia bahkan sampai ke Malaysia.<sup>64</sup> Masyarakat Minang di rantau juga mengalami krisis kepercayaan diri sehingga malu mengakui diri sebagai orang Minang dan bahkan banyak yang mengganti nama dengan nama yang berbau-bau Jawa.

Keadaan Sumatera Barat yang parah juga digambarkan dengan jelas oleh Harun Zain ketika ia ditunjuk menjadi dosen terbang di Fakultas Ekonomi yang didirikan oleh Prof. Sumitro Djojohadikusumo. Ketika ia tiba di bandara tabing dari Jakarta, ia dicegat oleh oknum-oknum tentara dan diinterogasi di dalam ruang tertutup selama dua jam, ia diperlakukan seperti orang yang dicurigai.<sup>65</sup> Pengalaman lain yang ia jumpai adalah ketika bertemu dengan masyarakat Sumatera Barat, tidak ada sinar kehidupan di mata mereka, tidak ada senyum di wajah mereka yang ada hanya sikap apatis dan mencurigai setiap orang yang datang. Ia juga mendapati mahasiswa-mahasiswa yang sedih seperti tidak memiliki masa depan. Mahasiswa-mahasiswa tersebut juga bersifat skeptis dan mencurigai Harun Zain sebagai kaki tangan pemerintah pusat.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Mochtar Naim, *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984), hal 264.

<sup>65</sup> Abrar Yusra, ed. *Tokoh Yang Berhati Rakyat: Biografi Harun Zain*. (Jakarta: Yayasan Gebu Minang, 1997), hal 97.

<sup>66</sup> *Ibid*, hal 104.

### C. PROFIL PELAJAR dan MAHASISWA yang TERLIBAT PRRI

#### 1. Asnil Sahim

Asnil Sahim dilahirkan di Cubadak Talu Pasaman pada tanggal 6 Mai 1937, ayahnya adalah seorang camat pada masa pemerintahan Belanda. Ia mendapatkan pendidikan dasar di kampung halamannya di Talu, setelah itu melanjutkan ke sekolah menengah pertama di Lubuak Basung. Tamat dari SMP ia melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas di Bukittinggi, karena waktu itu di kampungnya belum ada SMA.

Semasa SMA di Bukitinggi ia ditunjuk sebagai ketua pelajar Pasaman, ketika SMA ia belum terpikir untuk kuliah di Kedokteran. Waktu itu dalam pikirannya ia akan berkuliah di bagian pertambangan di Bandung, karena di daerahnya terdapat area pertambangan. Namun karena tidak memiliki cukup biaya kuliah di Bandung ia memutuskan kuliah di Bukitinggi saja, saat itu Fakultas Kedokteran baru dibuka di Bukittinggi,<sup>67</sup> maka resmilah Asnil Sahim menjadi mahasiswa kedokteran.

Ketika di bangku perkuliahan Asnil Sahim sangat aktif dalam organisasi kemahasiswaan, ia merupakan ketua senat dari Fakultas Kedokteran. Setelah Fakultas Kedokteran bergabung menjadi Universitas Andalas, ia juga ditunjuk untuk menjadi Sekretaris Jenderal (sekjend) mahasiswa pertama Universitas Andalas. Selain itu ia juga aktif dalam organisasi ekstra kampus yakni di Himpunan Mahasiswa Islam dan ditunjuk sebagai wakil ketua I HMI.

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Asnil Sahim. Padang, 22 Juni 2011.



Saat situasi di Sumatera Barat mulai goyah dengan diambilalihnya pemerintahan oleh Ahmad Husein dari Gubernur Roeslan Moelyohardjo, Asnil Sahim dan rekan-rekannya ikut menyatakan dukungannya untuk Ahmad Husein dan Dewan Banteng. Waktu itu Asnil Sahim dan rekan-rekannya ikut memilih bergabung dengan Dewan Banteng karena rakyat banyak yang ikut mendukung Dewan Banteng, dan mahasiswa sudah bisa menilai apa yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpin masa itu yakni tujuannya untuk mensejahterakan rakyat.<sup>68</sup>

Dukungan yang diberikan oleh Asnil Sahim berlanjut ketika Dewan Banteng berujung pada dibentuknya pemerintahan tandingan yaitu PRRI oleh Ahmad Husein. Tindakan dibentuknya PRRI membuat marah pemerintah pusat lalu mengirimkan pasukan militer untuk menumpas keberadaan PRRI. Asnil Sahim ikut ambil bagian dalam konfrontasi bersenjata dengan pemerintah pusat, ia mendapatkan pelatihan militer dan tergabung dalam Kompi Melati dan ia ditunjuk menjadi wakil komandan dalam Kompi Melati tersebut.

Setelah beberapa lama tergabung dalam Kompi Melati ia merasa keberadaan mahasiswa dalam satu kelompok dirasa kurang efisien, ia menginginkan ada peran lain yang bisa dijalankan mahasiswa selain sebagai tentara. Maka ia dan Saidal Bahauddin berangkat menuju markas Ahmad Husein di Solok untuk menyampaikan maksudnya tersebut, keinginannya tersebut mendapat sambutan positif dari Ahmad Husein. Maka diadakanlah pendidikan dan pelatihan bagi tentara pelajar dan

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Asnil Sahim. Padang, 22 Juni 2011.

mahasiswa ini di daerah Lintau, setelah lulus dari pelatihan tersebut Asnil Sahim ditugaskan menjadi sekretaris Ahmad Husein.<sup>69</sup>

Selama menjadi asisten Ahmad Husein banyak tugas yang dilakukan Asnil Sahim, mulai dari urusan surat menyurat sampai dengan urusan perbekalan pasukan. Kemana pun Ahmad Husein pergi, Asnil Sahim akan ikut serta bersamanya. Ia mencatat semua hasil-hasil rapat yang dilangsungkan oleh Ahmad Husein dan pemimpin-pemimpin lainnya. Asnil Sahim juga pernah ditugaskan sebagai penerima barang kiriman dari Amerika untuk PRRI.<sup>70</sup>

Hampir selama 3,5 tahun terjadi perang saudara, pemerintah pun mengambil kebijaksanaan dengan memanggil pemberontak kembali ke pangkuan ibu pertiwi dan diberikan amnesti dan abolisi. Asnil Sahim turun di daerah Solok bersama dengan Ahmad Husein. Setelah kembali ia pun melanjutkan studi kedokterannya di Universitas Andalas dan tamat tahun 1969, setelah itu ia melanjutkan studinya dengan mengambil pendidikan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI).<sup>71</sup>

Asnil Sahim merupakan dosen Fakultas Kedokteran sejak tahun 1963 sampai pensiun pada tahun 2011 ini. Disamping itu Ia juga memiliki beberapa tugas diantaranya ditugaskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk membangun Fakultas Kedokteran di Universitas Baiturrahmah. Ikut mengembangkan Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Sumatera Barat serta sekaligus sebagai wakil ketua

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Asnil Sahim. Padang, 13 Juli 2011.

<sup>70</sup> Wawancara dengan Asnil Sahim. Padang, 13 Juli 2011.

<sup>71</sup> Biodata Prof. DR. Asnil Sahim. Tanpa tahun terbit.



Yayasan jantung Sumatera Barat selama 27 tahun. Serta mempersiapkan berdirinya Rumah Sakit Khusus Jantung Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Sumatera Barat dan selama 5 tahun menjabat sebagai direktur utama RS Khusus Jantung.<sup>72</sup>

Berbagai penghargaan pun telah diterimanya sebagai dedikasinya dalam bidang kedokteran diantaranya tanda Kehormatan atau Satyalencana Karya Satya 30 tahun oleh Presiden RI tahun 1995. Tanda Penghargaan Perki Award dan Satya Lencana dalam membangun Bagian Kardiologi oleh PP Perki tahun 2007. Tanda penghargaan dan satya lencana Executive Asean oleh yayasan Anak Bangsa tahun 2008. Dan penghargaan/ Satya Lencana Tuah Sakato oleh Gubernur Sumatera Barat tahun 2004.

## **2. Syarifuddin Syarif**

Syarifuddin Syarif lahir di Padang pada tanggal 27 Oktober 1935, ayahnya memiliki toko optikal di Kota Padang sedangkan ibunya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Ia melalui masa pendidikan dasarnya di kota Padang, setelah tamat sekolah dasar ia melanjutkan sekolahnya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) juga di Kota Padang. Ketika terjadi agresi militer Belanda di Sumatera Barat, sekolahnya sempat terhenti untuk beberapa saat dan kemudian mengikuti ayahnya dan penduduk lain di kota Padang mengungsi ke Payakumbuh. Selama pengungsian di Payakumbuh ia sempat melanjutkan sekolahnya di sekolah pengungsian, setelah keadaan aman ia dan

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

keluarganya kembali ke Padang dan ia pun melanjutkan kembali sekolahnya. Setelah tamat SMP ia melanjutkan sekolahnya ke SMA di Yogyakarta karena waktu itu di Padang baru terdapat beberapa buah sekolah saja.<sup>73</sup>

Ketika terjadinya pergolakan PRRI Syarifuddin Syarif baru saja kembali ke Ranah Minang setelah menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Yogyakarta. Setelah bersekolah di SMA di Yogyakarta selama 4 tahun, ia berkeinginan untuk melanjutkan studinya di kampung halaman sendiri yakni ingin kuliah kedokteran di Bukittinggi. Namun keadaan yang didapatinya sungguh berbeda, karena telah terjadi pergolakan di daerahnya dan mahasiswa-mahasiswa kedokteran Unand ikut bergabung dengan PRRI.

Melihat kondisi seperti itu, Syarifuddin Syarif pun mengambil sikap dengan ikut melibatkan diri dengan PRRI walaupun ayahnya tidak merestui. Maka ikut mendaftarkan dirilah Syarifuddin Syarif menjadi tentara sukarela PRRI, ia dan sekitar 60 orang teman lainnya yang ikut bergabung dengan PRRI diberikan pelatihan militer di Lubuak Buaya di bawah komando Adnan Thaib. Setelah pelatihan dilakukan sekitar beberapa minggu ia dan rekan-rekannya ditugaskan menjaga daerah sekitar pantai karena APRI sudah mulai memasuki kota Padang. Namun ia dan rekan-rekannya tidak memberikan perlawanan di saat APRI masuk melalui daerah pantai karena ada perintah untuk tidak menembak, diduga komandan mereka telah bermain mata dengan pihak musuh.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Syarifuddin syarif. Padang, 23 Juni 2011.

<sup>74</sup> Wawancara dengan Syarifuddin Syarif. Padang, 23 Juni 2011.



Setelah kota padang berhasil dikuasai APRI, maka pihak PRRI mundur ke daerah pedalaman. Begitu juga dengan Syarifuddin Syarif dan rekan-rekannya, ia mundur melalui Kasang terus ke Lubuk Minturun dan terus ke arah Solok untuk mencari Ahmad Husein. Ia pun diminta untuk menjadi instruktur pelatihan militer di daerah Solok dan melatih pelajar-pelajar SMP dan SMA untuk menjadi komandan regu. Dalam karir kepelatihannya ia sering berpindah-pindah tempat untuk memberikan pelatihan militer seperti di daerah Koto Anau, Batu Banyak, Sirukam, Supayang dan Sungai Durian.<sup>75</sup>

Syarifuddin Syarif dipanggil untuk mengikuti pelatihan komandan pleton di Tabek Panjang Lintau. Pelatihan dilakukan selama 3 bulan dan setelah itu ia dikirim praktek lapangan ke Sawahlunto. Setelah lulus dari capa Tabek Panjang ia kembali bertugas sebagai instruktur militer masih di daerah Solok. Kemudian ia juga dipanggil untuk mengikuti Sekolah Pendidikan Inspektur (SPI) di Lubuk Sikaping di bawah pelatihnya Mayor Korp Komando operasi (KKO) Ali Sjaruddin. Tamatan pendidikan ini ditugaskan menjadi instruktur dalam pelatihan militer dan sekaligus diperbantukan sebagai perwira teritorial di wilayahnya.<sup>76</sup> Namun Syarifuddin Syarif tidak menyelesaikan pendidikan SPI dan memilih kabur, ia dan 5 orang rekannya memilih kabur karena tidak ingin menjadi instruktur militer lagi, mereka ingin bertempur.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Syarifuddin Syarif. Padang, 23 juni 2011.

<sup>76</sup> Wawancara dengan Syarifuddin Syarif. Padang, 23 Juni 2011. Lihat juga Mestika Zed dan Hasril Chaniago, *Perlawanan Seorang Pejuang Biografi Kolonel Ahmad Husein*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2001), hal 326.

<sup>77</sup> Wawancara dengan Syarifuddin Syarif. Padang, 23 Juni 2011.

Dalam pelariannya tersebut ia bertemu dengan Azwar Dt. Mangiang dan bergabung dengan kelompok Depot Bataliyon Infanteri (DBI) di bawah pimpinan Azwar Dt. Mangiang. Ia dan rekan-rekannya diberi tugas sebagai pengintai untuk menyelidiki kekuatan musuh. Bergabung dengan Azwar Dt. Mangiang tidak lama, karena ia akan dikirim pelatihan ke Jepang dengan beberapa orang temannya dari angkatan kedua, tapi ketika di Tapanuli ia bertemu dengan Boyke Nainggolan dan memintanya untuk tidak melanjutkan perjalanan ke Jepang akan tetapi bergabung dengan kelompok Boyke Nainggolan, sampai akhirnya ia kembali ke pangkuan ibu pertiwi di Tapanuli. Setelah kembali dari hutan ia memilih merantau ke Jakarta dan tidak melanjutkan pendidikannya.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Syarifuddin Syarif. Padang, 23 Juni 2011.



## BAB V

### KESIMPULAN

Perkembangan yang terjadi setelah proklamasi Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, tidak sesuai dengan harapan rakyat di daerah terutama di Sumatera Barat. Kehidupan yang diharapkan lebih baik setelah merdeka tidak juga terwujud, penguasa di pusat pemerintahan sibuk mengatur kursi mereka masing-masing sehingga pemerintahan sering kali jatuh bangun. Akibat yang ditimbulkan oleh ketidakbecusan pemerintah mengurus negara adalah tidak diperhatikannya rakyat-rakyat di daerah sehingga terjadi ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah, daerah seperti dianaktirikan oleh pemerintah pusat.

Tidak adanya perhatian serius yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap rakyat di daerah memaksa daerah untuk mengambil inisiatif sendiri. Melalui Dewan Banteng yang telah menerima kendali pemerintahan Sumatera Tengah dari gubernur Ruslan Moelyohardjo, maka daerah melaksanakan program-program pembangunan seperti memperbaiki jalan-jalan yang rusak, membuka jalan-jalan baru, memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak. Program pembangunan yang diusung oleh Dewan Banteng mendapatkan sambutan yang antusias dari rakyat di Sumatera Tengah.

Hampir sebagian masyarakat Sumatera Barat termasuk pemuda pelajar dan mahasiswanya memberikan dukungan kepada Dewan Banteng dan PRRI. Banyaknya mahasiswa dan pelajar yang ikut bergabung dengan PRRI, membuat pasukan

pemerintah pusat menganggap kampus Unand dan INS di Kayu Tanam sebagai sarang PRRI sehingga kedua tempat pendidikan tersebut dihancurkan oleh APRI.

Ketika Dewan Banteng berujung kepada dibentuknya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), pemuda pelajar dan mahasiswa tetap dengan setia mendukung keberadaan PRRI. Bahkan mereka menyatakan kesiapannya untuk dipersenjatai oleh PRRI untuk menghadapi tentara pemerintah. Kerelaan mereka mendukung PRRI dikarenakan rasa kecintaan mereka kepada kampung halaman dan tanah kelahirannya yang akan diobrak-abrik oleh tentara Soekarno. Dukungan yang diberikan oleh kalangan terpelajar ini tidak hanya dari pemuda pelajar dan mahasiswa yang ada di Sumatera Barat saja, mereka yang bersekolah di luar daerah juga memutuskan pulang kampung untuk mendukung PRRI.

Pemuda pelajar dan mahasiswa yang bergabung dengan PRRI diberikan pelatihan militer selama beberapa minggu setelah itu baru digabungkan dengan pasukan militer PRRI. Materi pelatihan yang mereka terima diantaranya cara menggunakan senjata, mengetahui taktik-taktik perang dan cara bertahan. Ketika APRI berhasil menguasai kota-kota penting di Sumatera Barat seperti Padang dan Bukittinggi, PRRI menyingkir ke luar kota dan melancarkan serangan gerilya dari daerah pedalaman Sumatera Barat.

Setelah kota-kota penting berhasil dikuasai oleh tentara pusat, koordinasi pasukan PRRI terlihat kacau balau. Melihat keadaan tersebut pemimpin-pemimpin PRRI mulai melakukan konsolidasi pasukan dengan membuka pendidikan capa di



Tabek Panjang, Lintau. Tujuan dari pendidikan ini adalah melatih kembali pasukan-pasukan dari mahasiswa dan pelajar untuk dijadikan komandan pleton, dan untuk mencari tenaga baru yang akan ditempatkan di beberapa pos penting pimpinan PRRI. Seperti menjadi pasukan pengawal pimpinan PRRI, menjadi asisten dan bekerja sebagai staf di beberapa teritorial yang masih dikuasai PRRI, serta ditunjuk sebagai instruktur militer untuk melatih komandan-komandan regu.

Tenaga sukarela dari pemuda pelajar dan mahasiswa ini menjadi penentu keberlangsungan PRRI selama 3,5 tahun bergerilya di hutan-hutan. Loyalitas mereka cukup tinggi terhadap perjuangan daerah dan terhadap PRRI, bantuan mereka sangat diandalkan dilapangan oleh pimpinan PRRI. Mereka memiliki semangat tempur yang tinggi dibandingkan dengan tentara regular PRRI.

Ketika PRRI berakhir dengan diberinya amnesti dan abolisi kepada pihak yang terlibat pemberontakan PRRI, pemuda pelajar dan mahasiswa pun ikut menerima amnesti dan abolisi tersebut. Mereka masih diizinkan untuk melanjutkan pendidikannya kembali, namun ada yang memilih untuk tidak kembali ke bangku sekolahnya tapi mencoba membuka usaha. Tidak sedikit dari orang-orang yang terlibat PRRI termasuk pelajar dan mahasiswa memilih pergi merantau meninggalkan kampung halaman mereka. Mereka sulit menerima kenyataan bahwa PRRI telah kalah dan perlakuan yang diterima di kampung sendiri sangat tidak baik karena mereka sering mendapatkan penghinaan dan pelecehan dari pihak yang berkuasa.

Dampak perang saudara yang terjadi di Sumatera Barat sangat buruk sampai meluluhlantakan tatanan sosial, politik dan budaya masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau mengalami krisis kepercayaan diri dan malu mengakui diri sebagai orang Minangkabau.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Asnan, Gusti. *Memikir Ulang Regionalisme Sumatera Barat Tahun 1950-an*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007)
- Chaniago, Khairul Jasmi. *Brigadir Jenderal Polisi Kaharoeddin Datuk Rangkyo Basa Gubernur di Tengah Pergolakan*. ( Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998)
- Dahlan, Halwin dkk. *Dari Dewan Banteng ke PRRI, Kemiripan Sejarah Yang Berulang di Era Reformasi*. (Padang: BKSNT, 2000)
- Gottchalk, Louis. *Mengerti Sejarah*. Terj, Nugroho Notosusanto. (Jakarta: UI Press, 1986)
- Idris, Soewardi. *Perjalanan Dalam Kelam Senarai Kisah Pemberontakan PRRI*. ( Yogyakarta: Beranda, 2008)
- Israr, M. Hikmat, ed. *H.C. Israr Kesederhanaan dan Kepejuangan Anak Payakumbuh*, (Bandung: Budaya Media, 2004).
- Kahin, Audrey. *Dari Pemberontakan Ke Integrasi Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005)
- M. Yamin, Dewan Banteng Contra Neo Ningrat. ( Jakarta: LPPM Tan Malaka, 2009)
- Naim, Mochtar. *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1979)
- Notosusanto, Nugroho. *Norma-norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah* (Markas Besar ABRI: Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, 1998)
- Putera Djaja, Soeripto. *Kegagalan Pemberontakan Husein CS*. (Surabaya: FA. Grip, 1958)
- R. Z. Leirissa. *PRRI-PERRESTA Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*, (Jakarta:Grafiti, 1997)
- Rahmat, Redi dkk. *Tantangan dan Rongrongan Terhadap Keutuhan dan Kesatuan Bangsa: Kasus PRRI*. ( Jakarta: Depdikbud. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Proyek Inventarisasi dan Dokumen Sejarah Nasional. 1992)

- Rusvan, Fajar dan Irham. *Bang Saidal Konsistensi Anak Zaman*. ( Jakarta: J C Institute, 2007)
- Salim, Makmum. *Sejarah Operasi-operasi Gabungan Terhadap PRRI-PERMESTA*, (Jakarta: Mabes ABRI Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, 1995)
- Syamdani. *PRRI Pemberontakan atau Bukan?*, (Yogyakarta: medpress, 2009)
- Syamdani, ed. *Kontroversi Sejarah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001).
- Yusra, Abrar, ed. *Tokoh Hati yang Berhati Rakyat: Biografi Harun Zain*, (Jakarta: Yayasan Gebu Minang, 1997).
- Yusra, Abrar. *Otobiografi A.A. Navis: Satiris dan Suara Kritis dari Daerah* (Jakarta: Gramedia, 1994).
- Zed, Mestika dan Hasril Chaniago. *Perlawanan Seorang Pejuang Biografi Kolonel Ahmad Husein*, (Jakarta: Pustaka sinar Harapan, 2001)
- Zed, Mestika dkk. *Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1995*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998).

## **B. MAKALAH DAN KORAN**

- Syuib, MS. "Pelajar, Mahasiswa dan Pemuda Pada Masa dan Paska PRRI", *Makalah Seminar PRRI di Padang* 14 Maret 2009.
- Singgalang, " Saat Meriam Soekarno Diarahkan ke Kota Padang, 400 Mahasiswa Beri Dukungan Kepada PRRI", 4 Februari 2000.

## **C. SKRIPSI dan TRANSKRIP WAWANCARA**

- Fatria, Joni. "Dewan Banteng di Sumatera Barat 1956-1958", *Skripsi*. ( Padang: Fakultas Sastra Unand, 1991).
- Israr. "Peranan HMI Dalam Aksi-aksi Menentang G 30S/ PKI di Kota Padang 1965-1968", *Skripsi*. ( Padang: Fakultas sastra Unand, 1999).
- Kusasi, Ahmad. "Aktivitas PRRI di Kabupaten Solok 1958-1961", *skripsi* ( Padang: Fakultas Sastra Unand, 2008).



Putra, Popi Adiyes. "Gerakan Kaum Muda Di Bawah Tekanan Orde Baru: Studi Tentang Pelajar Islam Indonesia di Sumatera Barat 1987-1998", *Skripsi* ( Padang: Fakultas Sastra Unand, 2005).

Mestika Zed dan Hasril Chaniago, Transkrip. *Transkrip Rekaman Wawancara Ahmad Husein (Tokoh PRRI)*. Pewawancara J. R. Chaniago.



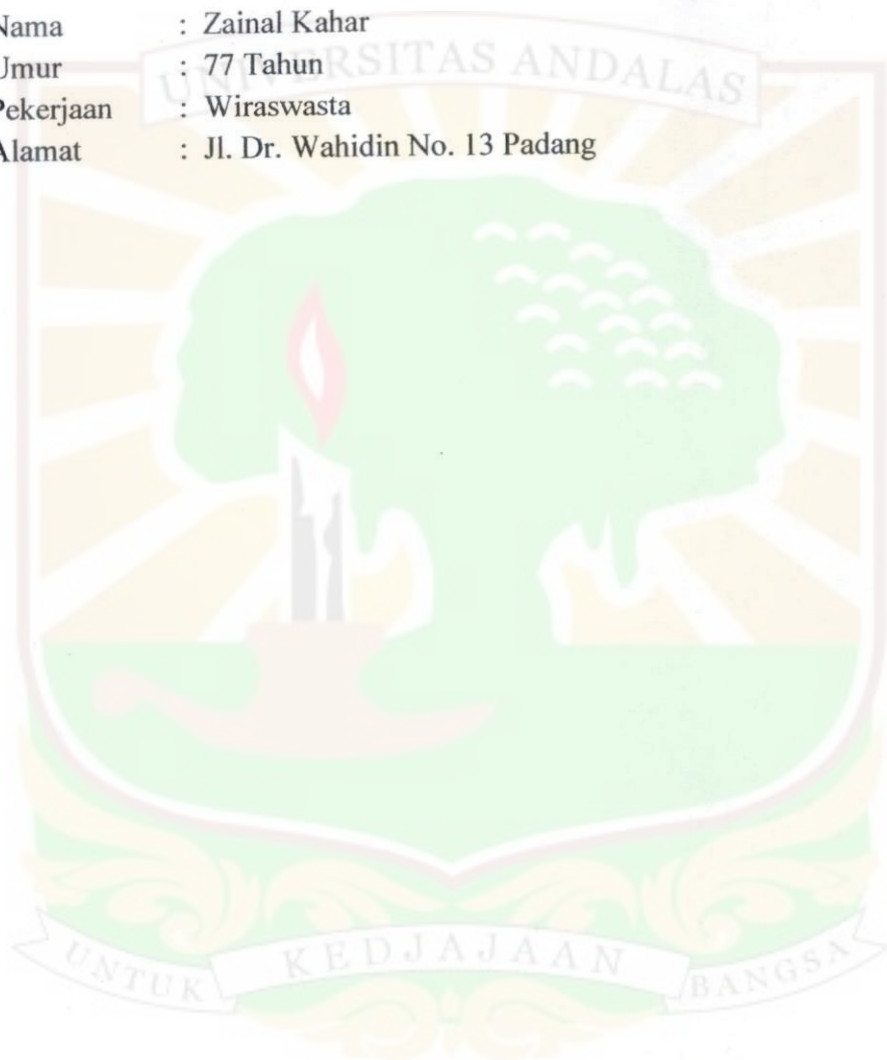
## DAFTAR INFORMAN

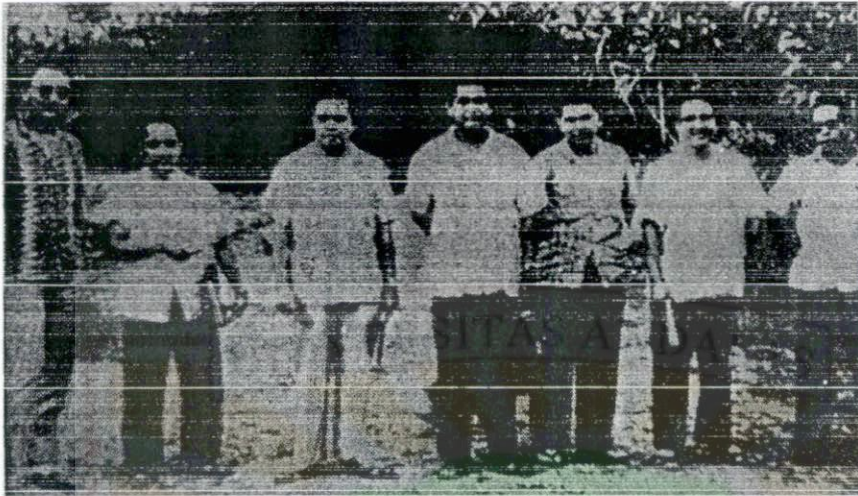
1. Nama : Prof. Dr. Asnil Sahim  
Umur : 74 Tahun  
Pekerjaan : Dokter  
Alamat : Jalan Kartini I/ 5 Padang
2. Nama : Azhar Muhammad  
Umur : 75 Tahun  
Pekerjaan : Pengusaha  
Alamat : Jl. Ratulangi, Padang
3. Nama : Nasar  
Umur : 76 Tahun  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Salimpaung, Tanah Datar
4. Nama : Prof. Dr. Saharman Leman  
Umur : 75 Tahun  
Pekerjaan : Dokter  
Alamat : Jalan Ratulangi No. 3 Padang
5. Nama : Sofyan Kahar, S.H.  
Umur : 83 Tahun  
Pekerjaan : Pensiunan PNS  
Alamat : Jl. Kehakiman No. 9 Padang
6. Nama : Syarifuddin Syarif  
Umur : 78 Tahun  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Imam Bonjol Padang
7. Nama : Drs. Syuib Ms  
Umur : 79 Tahun  
Pekerjaan : Pensiunan PNS  
Alamat : Jl. Andalas I No. 11 Padang



8. Nama : Umar Daud  
Umur : 79 Tahun  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Salimpaung, Tanah Datar

9. Nama : Zainal Kahar  
Umur : 77 Tahun  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 13 Padang





Pertemuan di Sungai Dareh - Sumatra Barat Januari 1958. Dari kiri ke kanan: Letnan Tema, Kol. Zulkifli Lubis, Kol. Dahlan Djambek, Kol. Maludin Simbolon, Letkol. Ventje Sumual, Letkol. Barlian, Letkol. Ahmad Husein

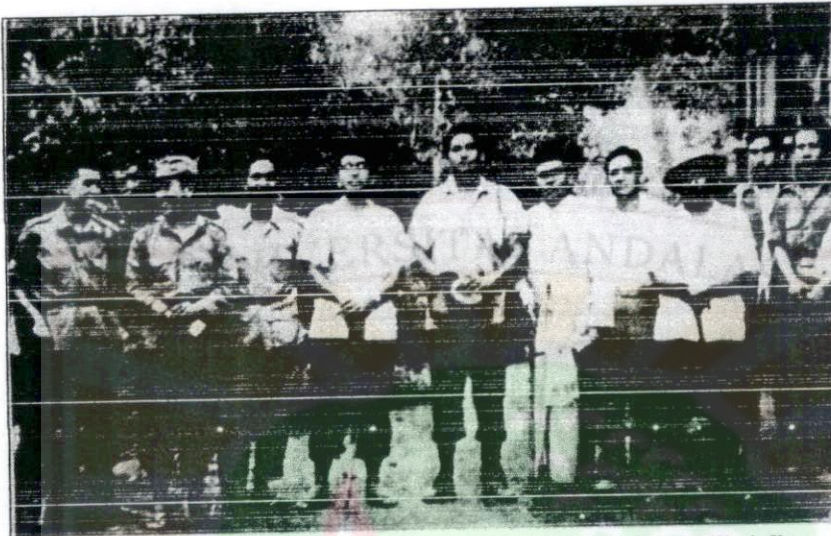
Sumber: WWW. Permesta. M 8. Net



PRRI diproklamasikan tanggal 15 Februari 1958 dan para menteriya dilantik. Dari kiri ke kanan: Kol. Dahlan Djambek, Mr. Burhanuddin Harahap, Letkol. Ahmad Husein, Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Kol. Maludin Simbolon. (Repro: *Life*)

Sumber: Www. Permesta. M 8. Net





Para tokoh PRRI di Sumatera Barat. Antara lain: dari kiri ke kanan: Kol. Dahlan Djambek, Letkol. Ahmad Husein (Ketua Dewan Perjuangan), Burhanuddin Harahap, Kol. Maludin Simbolon, Syafei, dan lain-lain.

Sumber: WWW. Permesta. M 8. Net



Contoh Uang yang digunakan oleh PRRI setelah terlebih dahulu ditandatangani oleh Ahmad Husein.



Contoh uang yang dicetak oleh PRRI dan digunakan sebagai pembayaran yang sah.

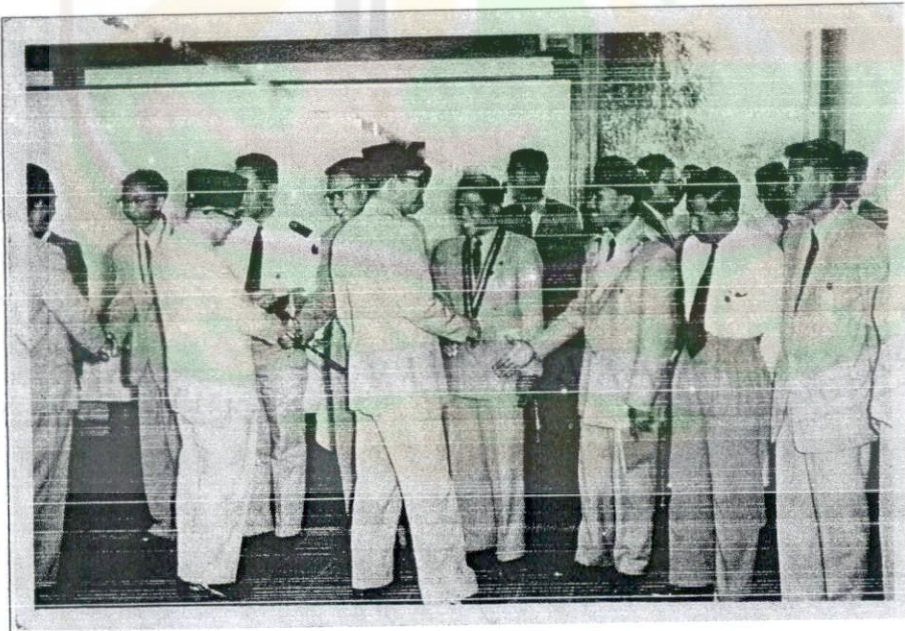


Photo: Asnil Sahim ketika diutus menghadiri pertemuan di ITB Bandung. Koleksi Asnil Sahim.



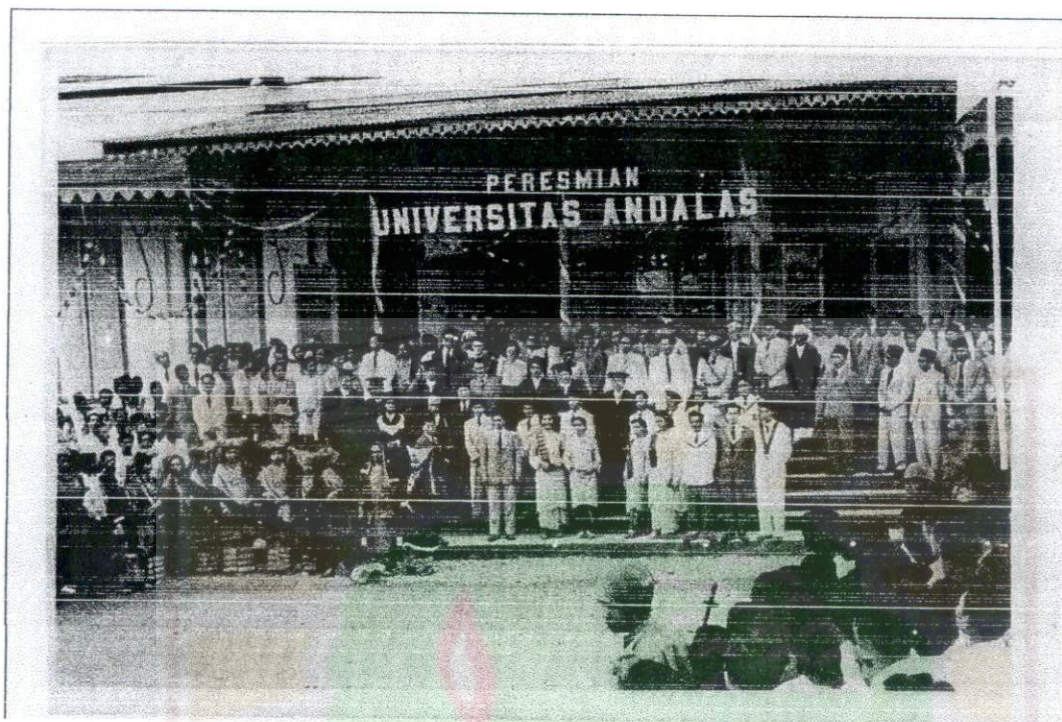
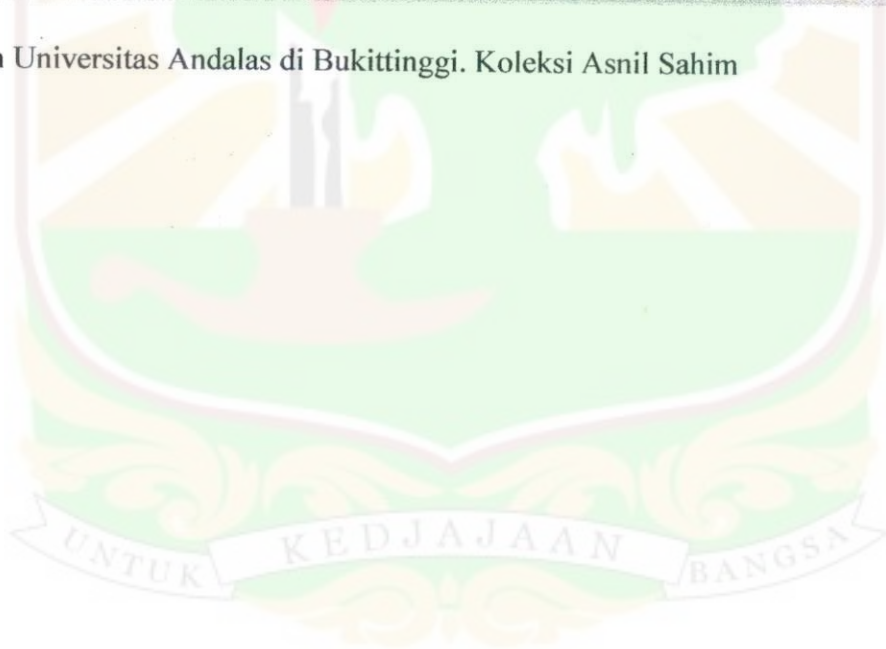


Photo: Peresmian Universitas Andalas di Bukittinggi. Koleksi Asnil Sahim





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPPRES 449/1961,  
PEMBERIAN AMNESTI DAN ABOLISI  
KEPADA ORANG ORANG YANG TERSANGKUT  
DENGAN PEMBERONTAKAN**

**Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor: 449 TAHUN 1961 (449/1961)**

**Tanggal: 17 AGUSTUS 1961 (JAKARTA)**

---

**KEPUTUSAN PRESIDEN**

Tentang:  
**PEMBERIAN AMNESTI DAN ABOLISI  
KEPADA ORANG-ORANG YANG TERSANGKUT  
DENGAN PEMBERONTAKAN**

**KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang:**

1. Bahwa perlu menaruh perhatian sepenuhnya terhadap keinsyafan orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan Daud Bereueh di Aceh, pemberontakan "Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia" dan "Perjuangan Semesta" di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Irian Barat dan lain-lain daerah, pemberontakan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, pemberontakan Kartosuwirjo di Jawa Barat dan Jawa Tengah, pemberontakan Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan, pemberontakan "Republik Maluku Selatan" di Maluku, yang kembali kepangkuan Republik Indonesia;
2. Bahwa untuk kepentingan Negara dan kesatuan Bangsa, perlu memberikan amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang tersebut diatas, yang dengan keinsyafan telah kembali kepangkuan Republik Indonesia, dengan jalan menyediakan membaktikan diri kepada Republik Indonesia dihadapan penguasa setempat, yaitu Penguasa Keadaan Bahaya Daerah atau Gubernur Kepala



Daerah atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk olehnya;

Mengingat: Pasal 14 Undang-undang Dasar;

Mendengar: Pertimbangan Badan Pembantu Penguasa Perang Tertinggi dalam sidangnya ke-17 pada tanggal 28 Juli 1961

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Pertama : Memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan Daud Bereueh di Aceh  
pemberontakan "Pemerintah Revolusinoer Republik Indonesia" dan "Perjuangan Semesta" di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi. Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Irian Barat dan lain-lain daerah.  
Pemberontakan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan,  
Pemberontakan Kartosuwiryo di Jawa Barat dan Jawa Tengah.  
Pemberontakan Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan,  
pemberontakan "Republik Maluku Selatan" di Maluku,  
yang selambat-lambatnya pada tanggal 5 Oktober 1961 telah melaporkan dan menyediakan membaktikan diri kepada Republik Indonesia,  
yang disertai dengan sumpah menurut Agama masing-masing serta penandatanganan atas sumpah itu dengan lafal yang berikut: "Saya bersumpah setia kepada Undang-undang Dasar, Manifestasi Politik yang telah menjadi Garis-garis besar dari pada Haluan Negara, Nusa dan Bangsa, Revolusi dan Pemimpin Besar revolusi", dihadapan penguasa setempat, yaitu Penguasa Keadaan Bahaya Daerah atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri atau Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Kedua : Amnesti dan abolisi diberikan kepada mereka yang tersebut dalam ketentuan pertama, mengenai tindak pidana yang mereka lakukan dan yang merupakan kejahatan:

1. terhadap keamanan Negara (Bab I Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana);
  2. terhadap martabat Kepala Negara (Bab II Buku II Kitab Undang undang Hukum Pidana);
  3. terhadap kewajiban kenegaraan dan hak kenegaraan (Bab IV Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana);
  4. terhadap ketertiban umum (Bab V Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana);
  5. terhadap kekuasaan umum (Bab VII Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana);
  6. terhadap keamanan Negara (Bab I Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara);
  7. terhadap kewajiban dinas (Bab III dan Bab V buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara);
  8. terhadap ketaatan (Bab IV Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara).
- dan tindak pidana lain yang ada hubungan sebab akibat atau hubungan antar tujuan dan supaya dengan tindak pidana yang tersebut angka 1 sampai dengan 8 diatas.

Ketiga:

(1) Dengan pemberian amnesti, semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang yang dimaksudkan dalam ketentuan Pertama dan Kedua, dihapuskan.

(2) Dengan pemberian abolisi, maka penuntutan terhadap orang-orang yang dimaksudkan dalam ketentuan Pertama dan Kedua, ditiadakan.

Keempat: Dengan keluarnya Keputusan ini, maka

Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 180 tahun 1959, Nomor 303 tahun 1959, Nomor 322 tahun 1961 dan Nomor 375 tahun 1961 tidak diperlukan lagi dengan Keputusan ini dicabut.

Kelima: Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Agustus 1961.  
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Agustus 1961.  
Sekretaris Negara.

MOHD. ICHSAN.

Sumber : WWW. Permesta. M8. net





== SECRETARIAAT PRAE-SENAT ==  
=====

"SURAT KETERANGAN"  
No:007/SFS/VI-1969

Dengan ini diterangkan:

Nama	: A.MOENAF.
Umur	: 33 tahun.
Djabatan	: Anggota Secretariaat Pre-Senat Republik Persatuan Indonesia.
Pangkat	: Frakit Tata Usaha.

Diharap kepada instansi sipil dan militer, supaya memberikan bantuan seperlunya kepada anggota tersebut diatas dimana perlu.-

Ditempat, 9 Djuni 1969.-  
KETUA PRAE-SENAT R.P.I.-

Sipomegang,

( A.Moenaf )



Korl M. Dahlan Djambek